

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Januari II Tahun 2021 No. 27

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Ecky Awal Mucharam

APBN Tak Sehat Publik Harus Tahu



Habis IKN Terbitlah Utang

Sejatinya yang kita butuhkan hari ini bukanlah desain tentang ibu kota negara baru tapi jauh lebih penting adalah desain pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Bukan melakukan pemborosan anggaran dan kebijakan yang tanpa pernah tergambar dalam janji kampanye. Seperti ide yang datang di pertengahan jalan dan hinggap dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh kita, mengatur cara berpikir dan bertindak.

Tiang pasak siap menjejak dan menghujam Pulau Kalimantan dalam bentangan 256 ribu hektare hutan yang sebagian perawan. Meski tak terjamah bukan berarti tak bertuan, karena sudah sejak lama menjadi wilayah konsesi. Baik oleh korporasi maupun pribadi.

Pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) disebut dalam waktu efektif kurang dari dua bulan, bahkan menjelang pengambilan keputusan 'diinjak gas' melewati waktu tempuh 16 jam per hari menuju paripurna. Tergopoh-gopoh dan trengginas, hingga

pada akhirnya naskah resmi jadi bahan koreksi.

Pindah ibu kota bukan ide baru, digagas dari zaman Soekarno hingga Pemerintah saat ini. Langkah hari ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi juga bukan sesuatu yang perlu. Secara faktual gagasan memindahkan ibu kota tak seimbang dengan kemampuan dan indikator yang dihadapi. Centang perenang utang bertumpuk makin hari makin banyak terakumulasi pada beban negara yang semakin besar. Selain itu, wabah pandemi belum kunjung usai

dan masih butuh perhatian.

Langkah pemindahan ibu kota menjadi tidak lazim dalam skema perbaikan ekonomi negara-negara di dunia. Kita seakan membuat anomali. Berlari pada titik episentrum yang berbeda dan menarik nafas dengan cara yang tidak sama.

Kreativitas memang dibangun dari struktur yang unik tapi sesungguhnya disusun dari cara berpikir yang runtut. Disiplin dan dinamis ditabuh dalam hentakan yang sama. Bukan angan-angan tanpa perencanaan.

Maka sudah sepantasnya memastikan bahwa seluruh kebijakan fokus dan serius mengembalikannya dekat jantung ekonomi masyarakat. Kisah tentang banyak rumah sakit yang belum ditunaikan pembiayaannya dalam pelayanan Covid, utang pemerintah yang masih menumpuk kepada BUMN, indeks logistik yang anjlok, distribusi pupuk yang tidak terselesaikan dan terluntalunta bagi para petani; hanya sedikit catatan yang nampak. Ada yang lebih penting dan perlu.

Sejatinya yang kita butuhkan hari ini bukanlah desain tentang ibu kota negara baru tapi

jauh lebih penting adalah desain pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Bukan melakukan pemborosan anggaran dan kebijakan yang tanpa pernah tergambar dalam janji kampanye. Seperti ide yang datang di pertengahan jalan dan hinggap dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh kita, mengatur cara berpikir dan bertindak.

Kita harus saling mengingatkan karena negeri ini dibentuk dalam sebuah kesepakatan, bukan sekadar menang dan kalah untuk sebuah kepentingan.

Evaluasi Akhir Tahun Kinerja Pemerintah, Fraksi PKS Sebut **Pemburukan Demokrasi** di Indonesia.

KUTIPAN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sukamta berpendapat bahwa Indonesia saat ini mengalami pemburukan demokrasi. Salah satunya indikatornya adalah menurunnya peringkat Indonesia di Indeks Demokrasi

Hal ini disampaikan dalam acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI Tahun 2021 yang digelar pada Selasa (28/12) siang.

"Menurut The Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan peringkat pada tahun 2020. Indonesia sekarang peringkat 64 dari 172 negara, dengan status Flawed Democracy atau demokrasi tidak sempurna" ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, turunnya Indeks Demokrasi ini disebabkan berbagai hal. Salah satunya adalah kurang berfungsinya parlemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sebagai contoh, koalisi besar partai politik yang mendukung



EVALUASI AKHIR TAHUN FRAKSI PKS DPR RI TAHUN 2021

pemerintah menjadikan legislasi tidak efektif dalam melakukan pengawasan pemerintah.

Hal ini cukup berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi bangsa.

"Oleh karena itu, PKS ingin memastikan agar ada pengawasan terhadap kekuasaan meski tidak maksimal karena kita hanya sendirian" ujar Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Selain itu, agenda kekuasaan terancam terpisah dengan agenda rakyat. Karena itu PKS akan terus menyuarakan aspirasi publik

dengan menolak kebijakan yang cenderung pro oligarki dan sentralistik. Sebagai contoh, PKS menolak UU Cipta Kerja yang sarat kepentingan Oligarki maupun UU HKPD yang sentralistik dan mengurangi wewenang daerah.

Sukamta juga menyoroti adanya keterbelahan masyarakat Indonesia saat ini. Menurutnya, ini disebabkan karena adanya para pendengung yang sengaja dipelihara oleh pihak tertentu untuk mengadu domba masyarakat.

"Keterbelahan ini akan terus dipelihara terutama para pendengung. Ini juga dipersulit dengan adanya Presidential Threshold 20% yang dapat menyempitkan calon presiden hanya dua orang saja" ujar Sukamta.

Di sisi lain, kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Indonesia semakin sempit. Padahal, ini merupakan indikator terpenting hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pembatasan kebebasan tersebut bisa dilihat dari berlakunya UU ITE, pembubaran organisasi dengan dalih isu radi-



H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam

"Turunnya Indeks Demokrasi ini disebabkan berbagai hal. Salah satunya adalah kurang berfungsinya parlemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sebagai contoh, koalisi besar partai politik yang mendukung pemerintah menjadikan legislatif tidak efektif dalam melakukan pengawasan pemerintah. Hal ini cukup berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi bangsa

kalisme dan kriminalisasi terhadap tokoh yang dianggap kritis.

Terakhir, Sukamta menyebutkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden sebagai indikator pemburukan demokrasi. Menurutnya, isu ini benar-benar

merugikan masyarakat karena dapat mengacaukan siklus kepemimpinan nasional dan daerah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Faisal Basri kepada PKS: Ancaman Oligarki Perlu Diwaspadai

KUTIPAN

Jakarta (28/12) — Ekonom Senior Faisal Basri menyampaikan evaluasi akhir tahun mengenai permasalahan oligarki yang kian mencengkram di Indonesia.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI 2021 pada Selasa siang (28/12/2021).

“Oligarki kian mencengkram dan ini adalah ancaman untuk kita bersama, yaitu melalui pelemahan institusi politik seperti penurunan indeks demokrasi dan pelemahan KPK. Pelemahan pada institusi ekonomi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan putusan MK mengenai UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat”, kata pakar ekonom tersebut.

Ironisnya, pelemahan institusi dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP No.26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Kemenperin No. 23/2021 menjadi alasan



EVALUASI AKHIR TAHUN FRAKSI PKS DPR RI TAHUN 2021

terhadap kehancuran pabrik gula dan tebu Indonesia.

Melalui PP tersebut, kata Faisal, pabrik gula lambat laun akan rontok, karena akan digantikan oleh 11 gula rafinasi yang dikuasai oleh tiga kelompok usaha besar di Indonesia yang tidak membeli tebu dari petani Indonesia atau membeli tebu dari negara lain karena dibebaskan membeli tebu dari petani.

“Ini merupakan pintu gerbang melibas pabrik gula dan pabrik tebu kita dan kepada PKS ini merupakan perhatian untuk Tapil di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang

merupakan 50% penghasil gula”, tegas ekonom senior INDEF.

Tahun 2020-2021 menjadi tahun pesta pora bagi para oligark, dimana pendapatan mereka pada tahun 2021 cukup fantastis. Beberapa berasal dari ekspor batu bara yang bisa mencapai sekitar Rp500 Triliun, Crude Palm Oil (CPO) Rp500 Triliun, serta iron and steel sekitar 90% nya merupakan hasil dari smelter nikel yang hampir seluruhnya dimiliki oleh China.

“Memang terjadi penciptaan nilai tambah yang berlipat ganda, tapi pelipat gandaan tersebut 90%nya dinikmati oleh China”, ujar akademisi Universitas Indonesia (UI).

“Pertanyaan kepada pemerintah adalah mengapa pendapatan Rp500 Triliun batu bara tersebut tidak dikenakan pajak ekspor. Padahal jika pemerintah mengenakan 25% pajak ekspor batu bara tersebut, setidaknya pemerintah dapat mengantongi Rp118 Triliun pada tahun ini yang bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat”, tambah Faisal.

Di sisi lain terdapat permasalahan yang terjadi di Indonesia, dimana angka pengangguran muda di Indonesia terbilang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2021 pengangguran berusia 15-24 tahun mencapai 19,55%. Namun, angka tenaga kerja asing China terus meningkat dimana pada bulan Oktober



FAISAL BASRI, MA Ekonom

“Oligarki kian mencengkram dan ini adalah ancaman untuk kita bersama, yaitu melalui pelemahan institusi politik seperti penurunan indeks demokrasi dan pelemahan KPK. Pelemahan pada institusi ekonomi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan putusan MK mengenai UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat”

2021 berjumlah sekitar 6.100 orang.

“Di tengah orang muda Indonesia kesulitan mencari pekerjaan, namun tenaga kerja asing China justru terus

meningkat yang mayoritasnya bukan merupakan tenaga ahli melainkan para buruh seperti tukang kebun, supir, satpam, dan lainnya. Dan ini yang harus kita waspadai,” tegas Faisal.



Ketua FPKS DPR: Publik Harus Diberi Ruang Seluas-luasnya untuk Evaluasi Pemerintahan

KUTIPAN

Jakarta (28/12) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menekankan pentingnya Anggota Legislative dalam membuka diri serta memberikan ruang-ruang publik bagi masukan, ide, dan pemikiran masyarakat dalam pembahasan Undang-Undang maupun evaluasinya.

Hal itu disampaikan dalam Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI Tahun 2021, yang digelar pada Selasa (28/12/2021).

"Kita anggota dewan dengan segala kelebihan yang ada pada kita, tetap saja kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Karena itu, sebagai Wakil Rakyat, 575 anggota dewan ini tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, dan tidak perlu minder ketika meminta dan mendapat masukan dari para anak bangsa yang memiliki kelebihan di bidangnya. Berikan ruang seluas-luasnya dengan manajemen waktu yang tentu harus kita atur," ujar



EVALUASI AKHIR TAHUN FRAKSI PKS DPR RI TAHUN 2021

Anggota Komisi I tersebut.

Jazuli menuturkan pula bahwa Fraksi PKS terus mengupayakan hal tersebut, salah satunya dengan mengadakan evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Evaluasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PKS selaku partai oposisi, dalam memberikan pembelajaran politik dan check and balances jalannya roda pemerintahan.

"Banyak yang kami

lakukan meskipun sebagian masyarakat mungkin belum mendengarnya. Anggota Fraksi PKS dari 575 anggota dewan hanya 50, karena itu wajar kalau dalam pengambilan keputusan-keputusan yang 50 ini kerap kali terkalahkan walaupun kami menyampaikan aspirasi dari masyarakat, umat, ormas Islam, komunitas pemuda, pedagang, petani, dan nelayan. Semua kami suarakan dengan lantang di mimbar parlemen ini," sambung Legislator yang mewakili Dapil Banten II itu.

Anggota BKSAP DPR RI itu menambahkan bahwa Fraksi PKS harus menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi-aksi yang membela kepentingan umat, rakyat, dan menjaga Negara Republik Indonesia.

Hal itu terlihat dari beberapa kiprah Fraksi, mulai dari penolakan beberapa regulasi seperti UU Omnibus Law yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang tidak berlandaskan pada TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang menimbulkan pertanyaan



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Fraksi PKS terus mengupayakan hal tersebut, salah satunya dengan mengadakan evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Evaluasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PKS selaku partai oposisi, dalam memberikan pembelajaran politik dan check and balances jalannya roda pemerintahan."

tentang arah ideologi Pancasila, Perpu No. 1/2020 yang memberikan wewenang bagi eksekutif untuk mengalokasikan anggaran di masa pandemi tanpa persetujuan DPR, catatan kritis

Fraksi PKS terhadap UU Ibu Kota Negara, serta kritik atas alokasi APBN yang harus ditingkatkan efektivitasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Evaluasi Kinerja Pemerintahan 2021,

Aleg PKS: APBN Tak Sehat, Publik Harus Tahu!

KUTIPAN

Jakarta (28/12) — Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ecky Awal Mucharam menyampaikan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi.

Ecky menyampaikan hal tersebut dalam Acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI pada Selasa (20/12/2021).

"Perjuangan fraksi di bidang ekonomi dan keuangan dapat dilihat melalui PERPU 2021, Penolakan UU Perpajakan, HKPD. Hal tersebut perlu diketahui oleh publik meskipun tidak mudah" ujar Ecky.

Sejak awal 2021, Indonesia telah mengalami berbagai masalah perekonomian, hal tersebut juga tidak dipungkiri dapat terjadi karena dampak dari Pandemi Covid-19.

"Kebijakan fiskal, ekonomi dan sektoral perlu untuk diperhatikan kembali oleh pemerintah guna menjamin tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungk

**EVALUASI
AKHIR TAHUN
FRAKSI PKS
DPR RI TAHUN
2021**

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Tidak hanya itu, Ecky menyampaikan bahwa dalam konteks APBN, utang negara yang mencapai 41,38% PDB yang sudah melebihi porsi yang sudah melebihi porsi yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat" pungk

"Bagaimana mungkin APBN negara sehat sedangkan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat" pungk

Perlu diketahui bahwa kebijakan APBN harus mampu menopang perekonomian

negara ini, dimana setiap pengeluaran yang dikeluarkan harus efektif dan efisien sekaligus juga mampu memberikan multi efek terhadap sektor lainnya.

"Sedangkan, perekonomian negara saat ini seperti besar pasak daripada tiang, dimana banyak BUMN yang tidak sehat dan perlu diselamatkan oleh APBN melalui Pajak Rakyat dan Utang yang berujung pada kekhawatiran," tutur Ecky.

Selanjutnya Ecky menyampaikan bahwa Program Pemulihan Nasional ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar yang perlu diketahui oleh publik mengingat fakta di lapangan membuktikan bahwa angka pengangguran kaum milenial mencapai 19,55%

"Program Pemulihan Nasional harus dibedah kembali mengingat pemerintah hingga saat ini belum menyampaikan secara terang-terangan terkait dengan kebijakan fiskal secara sektor riil," ujar Ecky

Di momen Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 menjadi perhatian khusus bagi kita semua mengingat Indonesia sedang ditengah

**H. ECKY AWAL MUCHARAM**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ekonomi dan Keuangan

"Masyarakat tengah mengalami kondisi yang menyulitkan, seperti terjebak pinjaman online illegal, lalu RUU IKN yang sedang dibahas ditengah Kesulitan Ekonomi Rakyat. Dengan demikian, Fraksi PKS melihat bahwa perlu ada perbaikan dari Hulu terkait dengan kebijakan yang ada"

Kondisi Ekonomi yang mengkhawatirkan.

"Masyarakat tengah mengalami kondisi yang menyulitkan, seperti terjebak pinjaman online illegal, lalu RUU IKN yang sedang dibahas

ditengah Kesulitan Ekonomi Rakyat. Dengan demikian, Fraksi PKS melihat bahwa perlu ada perbaikan dari Hulu terkait dengan kebijakan yang ada" Tegus Ecky.

Evaluasi Akhir Tahun PKS, Wakil Ketua Umum MUI: Umat Islam **Harus** Perkuat Ekonomi dan Bisnis

KUTIPAN

Jakarta (28/12) — Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menyampaikan beberapa hal terkait kebangsaan dalam acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI Tahun 2021 yang berlangsung pada Selasa (28/12) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Anwar Abbas membuka dialognya dengan menjelaskan data terkait prosentase penurunan penganut agama Islam di Indonesia. Terhitung sampai tahun 2020, umat Islam di Indonesia mengalami penurunan sebesar 8-9%. Anwar Abbas menyimpulkan bahwa adanya masalah dalam umat Islam itu sendiri.

"Ketika negeri ini diprokalamirkan, jumlah umat Islam di Indonesia sekitar 95% kemudian menurun hingga mencapai 87%. Jumlah umat Islam menurun lagi sejak 2020 hingga mencapai 86%. Itu berarti umat Islam di Indonesia



EVALUASI AKHIR TAHUN FRAKSI PKS DPR RI TAHUN 2021

penganutnya menurun 8-9%. Kesimpulannya berarti dalam umat Islam ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak terjadi penurunan secara kuantitatif." jelas Wakil Ketua MUI tersebut.

Selanjutnya, Anwar Abbas berpendapat bahwa yang harus diperkuat dalam agama Islam adalah ekonomi dan bisnis. Umat Islam terlalu fokus kepada aspek lain seperti politik, sosial atau budaya sehingga para

pengusaha dari kalangan penduduk asli tersingkir.

"Yang harus diperkuat dalam agama ini dalam ekonomi dan bisnis. Karena kemajuan bangsa bukan hanya dari politik saja, melainkan dari para pengusaha yang memiliki bisnis. Di Indonesia kebanyakan pengusaha berasal dari etnis cina, justru penduduk asli tidak mendorong majunya ekonomi dan bisnis." kata Anwar Abbas.

Selanjutnya, ketua PP Muhammadiyah tersebut memberi masukan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan rakyat untuk melahirkan lebih banyak lagi pengusaha atau pebisnis dengan memberikan pelajaran tentang kewirausahaan dengan tetap berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Masalah yang dihadapi oleh bangsa kita bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi masyarakatnya juga. Maka dari itu, hubungan pemerintah dan rakyat harus terjalin baik, sama-sama memiliki sudut pandang yang sama. Pemerintah memberikan pendidikan berwirausaha



Dr. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag

Ketua PP Muhammadiyah/Wakil Ketua Umum MUI

"Masalah yang dihadapi oleh bangsa kita bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi masyarakatnya juga. Maka dari itu, hubungan pemerintah dan rakyat harus terjalin baik, sama-sama memiliki sudut pandang yang sama. Pemerintah memberikan pendidikan berwirausaha kepada masyarakat tetapi tetap dalam ideologi Pancasila"

kepada masyarakat tetapi tetap dalam ideologi Pancasila." tegasnya.

Sebagai penutup, Anwar Abbas menyampaikan bahwa sistem ekonomi di Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila sebagai bekal untuk

menjadi negara maju tanpa mengesampingkan nilai Pancasila. Negara akan kuat jika saling membangun satu sama lain tanpa menjatuhkan pihak yang besar maupun yang kecil.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Wakil Ketua FPKS Tegaskan Kominfo Kembali Gagal Lindungi Data Rakyat Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (07/01) — Kebocoran data kembali terjadi, kali ini data catatan medis pasien di sejumlah rumah sakit di Indonesia berukuran 720 GB berupa documents dan 6 juta database di jual dalam Raidforums.

Kebocoran ini menambah jumlah kasus kebocoran data yang terjadi di tahun 2021 yang terjadi sebanyak 8 kasus besar dengan jutaan data.

Menanggapi hal ini anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan bahwa Kominfo tidak belajar dari kesalahan kebocoran data beberapa waktu lalu.

"Kami di Komisi 1 DPR RI sudah berulang kali menyampaikan bahwa kebocoran-kebocoran data harus ditangani dengan baik oleh Kominfo. Kominfo sebagai leading sektor digital bertanggung jawab mengatur manajemen perlindungan data

lebih ketat berbagai kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Kesehatan. Apalagi data kemenkes yang berhubungan dengan Covid-19 beberapa waktu lalu pernah dibobol. Seharusnya pengawasan lebih ketat, namun faktanya sekarang data Kemenkes RI kembali bobol. Artinya Kominfo gagal menjaga data masyarakat dan tidak bisa memimpin K/L dalam melindungi data masyarakat," papar Sukamta.

Permasalahan data ini, tegas Sukamta, krusial menurut perhitungan lembaga riset Ponemon-IBM, besarnya kerugian kebocoran 279 juta

penduduk Indonesia dari data BPJS mencapai lebih dari 600 triliun rupiah.

"Ini baru satu kebocoran, tentu kebocoran data lainnya akan lebih besar," tandasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI juga mengingatkan Kominfo untuk benar-benar menjaga aplikasi peduli lindungi yang diklaim menjadi super apps.

"Trend kebocoran data selama pandemi Covid-19 ini menyasar data-data kesehatan yang berharga. Maka kami ingatkan kembali, jaga dengan serius data-data di aplikasi peduli lindungi, jangan lengah dan jumawa."

Dari sisi lain, doktor lulusan Inggris ini menyoroti perihal kepercayaan publik

"Dampak kebocoran data ini ialah turunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah terkait keamanan data. Data yang bocor membuat masyarakat banyak mendapatkan pesan-pesan tidak jelas dan mengganggu sehingga kepercayaan dan keyakinan terhadap keamanan data dirinya berkurang."

Masih terkait dengan kebocoran data pribadi ini, Sukamta mengingatkan Kominfo untuk segera menyelesaikan masalah krusial dalam RUU Perlindungan Data Pribadi khususnya mengenai lembaga perlindungan data.

"RUU PDP ini macet karena Kominfo masih ngotot lembaga perlindungan data berada di



H. SUKAMTA, Ph.D.
Anggota Komisi I DPR RI

"Kami di Komisi 1 DPR RI sudah berulang kali menyampaikan bahwa kebocoran-kebocoran data harus ditangani dengan baik oleh Kominfo. Kominfo sebagai leading sektor digital bertanggung jawab mengatur manajemen perlindungan data lebih ketat berbagai kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Kesehatan

bawah Menkominfo. Padahal saat ini saja Kominfo tidak punya kemampuan menangani permasalahan kebocoran data. Kominfo harus berkaca, sadar kemampuan diri. Selain itu, banyak negara di dunia khususnya Eropa mengkhhususkan sebuah lembaga

perlindungan data yang independen bukan di bawah kementerian," menurut pesan tertulis yang dikirim oleh Anggota Dewan asal daerah pemilihan DI Yogyakarta (07/01/2022).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS: Janji Pemerintah Tingkatkan Produksi Kedelai Nasional **Gagal Total**

KUTIPAN

Jakarta (05/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mendorong Kementerian Pertanian agar berkomitmen dan kerja keras untuk meningkatkan produksi kedelai nasional.

Pasalnya, kata Johan, janji tahun lalu untuk melipatkan produksi kedelai tidak terlaksana dan tidak terwujudnya percepatan budidaya kedelai selama tahun 2021 lalu.

"Saya berharap Pemerintah tidak melakukan kesalahan yang sama pada tahun ini dan lebih berkomitmen mendorong produktivitas kedelai nasional," cetus Johan.

Legislator Senayan ini bahkan menyatakan bahwa tahun lalu telah terjadi kelangkaan benih kedelai, hal ini diakibatkan karena pemerintah tidak menyalakan program khusus untuk ketersediaan benih kedelai.

"Saya menyesalkan Pemerintah lamban untuk melakukan perbanyakkan benih kedelai, padahal kita memiliki begitu banyak balai benih dan

produsen benih yang dapat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan benih kedelai," pungkas Johan.

Politisi PKS ini mengingatkan, tahun lalu secara gamblang Menteri Pertanian telah berjanji bahwa produksi kedelai lokal akan ditingkatkan dalam waktu dua kali masa tanam.

"Namun kenyataannya meleset karena produksi kedelai lokal tidak pernah meningkat dan tidak ada komitmen untuk memperluas areal tanam kedelai," ujar Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini menyatakan bahwa pertumbuhan kebutuhan konsumsi kedelai selalu melebihi pertumbuhan produksi dalam negeri, dan pemerintah hanya bisa melakukan impor untuk hal tersebut serta tidak memiliki terobosan melakukan

upaya swasembada kedelai.

"Saya yakin negara kita memiliki peluang ber-swasembada kedelai pada masa mendatang dan mampu meningkatkan produksi jika punya komitmen terhadap komoditi kedelai lokal," papar Johan.

Johan menyebutkan bahwa ketidakstabilan produksi kedelai di Indonesia akibat adanya penurunan luas panen kedelai yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas kedelai.

"Hal ini mesti jadi perhatian pemerintah agar memberi prioritas pada pembangunan Pertanian yang berorientasi pada swasembada kedelai," tegas Johan.

Ketua DPP PKS ini berharap Pemerintah dapat memberi bantuan subsidi input produksi untuk mendukung kegiatan budidaya kedelai.

"Saya yakin petani akan lebih bersemangat menanam kedelai jika pemerintah menjamin semua input produksi seperti benih, pupuk dan sarana lainnya untuk membantu petani agar lebih giat meningkatkan produktivitas kedelai lokal", demikian tutup Johan Rosihan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

"Tahun lalu secara gamblang Menteri Pertanian telah berjanji bahwa produksi kedelai lokal akan ditingkatkan dalam waktu dua kali masa tanam. Namun kenyataannya meleset karena produksi kedelai lokal tidak pernah meningkat dan tidak ada komitmen untuk memperluas areal tanam kedelai



Harga Pangan Masih Tinggi, Aleg PKS Minta Solusi Kongkrit, Bukan Saling Menyalahkan

KUTIPAN

Jakarta (08/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menanggapi awal tahun 2022 disambut dengan kenaikan harga pangan di berbagai komoditas mulai dari gabah, jagung, cabai, telur, minyak goreng dan lainnya.

Pria yang akrab disapa Akmal ini meminta Pemerintah menemukan solusi konkrit dan tidak menyalahkan satu sama lain.

"Persoalan harga pangan ini ketika pemerintah dikritisi, sebagai contoh Kementerian pertanian, maka akan ada pendapat yang berkelit bahwa persoalan harga ini tanggung jawab Kementerian perdagangan," ujarnya.

Bahkan, imbuh Akmal, Kepala Negara sendiri beberapa hari lalu menunjukkan rasa kesalnya yang dipublikasi dengan pernyataan Harga minyak goreng harus tetap terjangkau, jika perlu Mendag melakukan operasi pasar.

"Saat ini yang dibutuhkan adalah solusi kongkrit, bukan

wacana. Rakyat sudah menunggu lama soal perbaikan tatanegara pangan ini. Harap-harap rakyat pada penurunan harga pangan ini sudah terlalu lama hingga berganti tahun, karena mereka telah mengalami penurunan daya beli sebagai dampak akibat pandemi covid-19 yang tidak kunjung selesai", tutur Akmal.

Politisi PKS ini menerangkan, meski ada momen Nataru yang mengakibatkan Makanan minuman jadi penyumbang utama inflasi, akan tetapi bila pondasi ekonomi kerakyatan kita kuat tidak akan terlalu menjadi gejala yang berarti.

"Permintaan produk pangan yang melonjak namun

suplainya terkontraksi semestinya akan cepat teratasi dan tidak berlarut-larut," ujar Akmal.

Akmal menyampaikan, dari data BPS yang ia peroleh, kelompok pengeluaran makanan dan minuman, komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai rawit, minyak goreng, dan telur ayam ras. Cabai rawit menyumbang 0,11%, minyak goreng sebesar 0,8%, dan telur ayam ras sebesar 0,05% terhadap inflasi pada Desember 2021.

"Hingga medio Januari tahun 2022 harga pangan masih bergejolak. Saya berharap, koordinasi kementerian, kemendag, bulog dibawah naungan Kementerian perekonomian mesti mampu menyelesaikan persoalan pangan ini. Jangan sampai sesama lembaga pemerintah ini saling tunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini", kritis Akmal.

Pria kelahiran Bone ini meminta khusus pada Kementerian Pertanian, agar tahun 2022 ini ada perbaikan dari tahun sebelumnya terutama menghadapi persoalan



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Dimasa yang akan datang, pemerintah harus lebih siap menghadapi moment hari besar, seperti Nataru, dan Hari raya ledul Fitri atau ledul Adha. Tidak perlu lagi ada alasan kenaikan harga pangan bukan karena stok, tapi karena moment hari besar. Mesti dicari solusinya, kestabilan harga pangan, dan walaupun naik mesti wajar dan durasinya tidak terlalu lama"

pertanian dan pangan. Permasalahan utama di kementerian teknis adalah ketersediaan.

"Bagaimana kementerian mampu memperkuat penyediaan stok pangan dalam negeri dengan produksi yang cukup sehingga

kementerian perdagangan tidak ada alasan untuk impor sebagai alat instrumen pengendalian harga," pungkas Akmal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

IKN Dikebut, Legislator PKS Ingatkan Potensi Besar Bencana Ekologis

KUTIPAN

Jakarta (30/12) — Saat ini Pemerintah dan DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang ditujukan untuk menjadi legal standing perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).

Dalam beberapa informasi yang beredar di kalangan media diketahui nantinya wilayah IKN ini tersebar seluas lebih dari 250 ribu hektar dengan kontur wilayah mulai dari perbukitan, Daerah Aliran Sungai (DAS) sampai di wilayah pesisir.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Komisi (Kapsi) IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, mengingatkan bahwa perpindahan IKN ini berpotensi memperbesar bencana ekologis di daerah Kalimantan Timur khususnya daerah yang menjadi lokasi ini maupun penunjang proyek IKN ini.

Slamet menjelaskan perpindahan ibu kota harus berdasarkan kajian yang mendalam dan tidak boleh

terburu-buru.

"Dari penelusuran kami hampir belum ada penelitian ilmiah yang spesifik membahas terkait dengan perpindahan IKN ini dari sisi sosial ekonomi dan lingkungan atau yang kita kenal dengan pilar pembangunan berkelanjutan," ujar Slamet di Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Penelitian ilmiah terkait dengan bencana ekologis, kata Slamet, sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memindahkan IKN mengingat sinyal potensi bencana tersebut sudah ditemukan dalam dokumen Rapid Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan KLHK pada tahun 2020.

"Ancaman kekeringan, kekurangan pangan dan tentu saja potensi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi perlu segera mendapatkan perhatian yang serius jika tidak potensi bencana ekologis akan mengancam wilayah IKN yang baru tersebut," ungkapnya.

Belum lagi, imbuh Slamet, terkait dengan lingkungan dan konservasi Wilayah IKN memiliki keanekaragaman hayati (kehati) yang sangat beragam.

"Sebaran kehati di wilayah IKN ditandai dengan jumlah tumbuhan di Kalimantan Timur sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia, 25 jenis herpetofauna dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik, dan spesies penting," pungkas Slamet.

Menurut hasil KLHS masterplan IKN (KLHK, 2020), terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik dan spesies penting. Sebaran spesies penting ini dapat dijumpai di Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung yang berada di sekitar wilayah IKN dan Kawasan Pelestarian Alam berupa burung endemik, Orangutan, Beruang



drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

"Dari penelusuran kami hampir belum ada penelitian ilmiah yang spesifik membahas terkait dengan perpindahan IKN ini dari sisi sosial ekonomi dan lingkungan atau yang kita kenal dengan pilar pembangunan berkelanjutan"

Madu, Lutung Merah, Owa Kelawat, Macan Dahan, Kucing Hutan, Rusa Sambar dan lainnya. Selain itu, juga telah teridentifikasi 33 jenis

dipterokarpa yang berada di KHDTK Samboja, 35 jenis yang berada di konsesi ITCIKU, dan 25 jenis berada di Hutan Lindung Sungai Wain.



HET Minyak Goreng Naik, Aleg PKS: Indikasi Pemerintah Gagal Atasi Tekanan Konglomerat

KUTIPAN

Jakarta (11/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto berpendapat, bergesernya harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dari 11.000 rupiah menjadi 14.000 rupiah mengindikasikan pemerintah gagal mengatasi tekanan dari para konglomerat sawit.

Hal itu, kata Hermanto, seharusnya tidak terjadi karena Pemerintah memiliki kekuatan regulasi untuk mengkonsolidasikan para konglomerat tersebut.

"Pemerintah berdalih kenaikan HET minyak goreng itu terjadi karena kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global. Mestinya hal tersebut dapat diatasi karena sawit Indonesia melimpah. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia," papar Hermanto kepada wartawan menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-3 DPR RI tahun 2021-2022, Selasa (11/01).

Sebagai produsen CPO

terbesar di dunia, kata Hermanto, mestinya Pemerintah Indonesia dapat memainkan politik dagang dunia yang dominan mempengaruhi harga sawit global.

"Jangan sebaliknya, negara yang bukan penghasil sawit malah dominan mempengaruhi harga sawit global," tandas legislator dari FPKS DPR ini.

"Kenaikan HET minyak goreng juga seharusnya tidak terjadi karena HET merupakan harga kompromi yang memenuhi unsur keadilan sosial untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat dan proteksi negara terhadap masyarakat yang tidak

mampu," tambah Hermanto.

Ironisnya meski HET sudah naik ke Rp. 14 ribu, lanjutnya, harga minyak goreng di pasaran masih jauh diatas harga tersebut. Pusat Informasi Pangan Strategis Nasional (PIPSN) belum lama ini merilis harga minyak goreng per kilogramnya dijual di kisaran Rp 19.000 sampai dengan Rp 24.000.

"Harga belum juga turun padahal pemerintah telah gencar melakukan operasi pasar dengan harga Rp 14.000. Operasi pasar dan kenaikan HET tidak mampu menurunkan harga. Pemerintah perlu memperkuat regulasi," papar Hermanto.

Hampir sebulan ini harga minyak goreng menjadi perbincangan publik terutama dikalangan pedagang eceran karena pasokan minyak goreng minim. Pedagang gorengan dan ibu-ibu rumah tangga mengeluh karena harganya terus melambung melampaui HET.

"Harga mestinya kembali normal dan stabil setelah dilakukan operasi pasar. Tapi nyatanya harga tetap tinggi, hal ini mengindikasikan operasi



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, mestinya Pemerintah Indonesia dapat memainkan politik dagang dunia yang dominan mempengaruhi harga sawit global. Jangan sebaliknya, negara yang bukan penghasil sawit malah dominan mempengaruhi harga sawit global,"

pasar tidak mempan," ujar Hermanto.

Menurutnya, minyak goreng sudah menjadi komoditas pangan pokok strategis yang menjadi kebutuhan harian masyarakat Indonesia. Harganya memiliki dampak transmisi pada

produk turunannya.

"Kenaikan harga minyak goreng akan memicu inflasi. Karena itu mestinya harganya perlu dijaga secara stabil oleh pemerintah," ucap Hermanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Apapun masalah daya dukung di Jakarta
kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan,
bukan lari dari masalah/lepas tanggung jawab.

**H. SURYADI JAYA
PURNAMA, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI



Calon IKN Sering Banjir dan Sulit Air, Aleg PKS: Warga Tidak Mau Ada IKN

KUTIPAN

Jakarta (03/01) — Banjir kembali melanda Calon Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Kali ini banjir menimpa daerah kawasan inti IKN yaitu di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin menyampaikan, banjir yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah belum memberikan solusi yang konkret buat warga di sekitar calon IKN agar terbebas dari banjir.

"Seharusnya warga sekitar calon IKN mendapatkan kesempatan pertama untuk menikmati kesejahteraan yang dijanjikan sebelum IKN dipindahkan ke PPU," kata Hamid yang juga merupakan Anggota Pansus IKN.

Hamid menambahkan, kesejahteraan yang dimaksud terutama di bidang Sumber Daya Air (SDA) dimana masyarakat di daerah tersebut dapat terbebas dari banjir dan kebutuhan airnya tercukupi.

Sebab, imbuh Hamid, banjir dan kekurangan air biasa-

nya terjadi karena pengelolaan SDA yang buruk, dimana biasanya pada musim kemarau terjadi kekurangan air dan pada musim hujan terjadi banjir.

"Sebagai contoh kondisi kekurangan air ini pernah terjadi pada September 2019, dimana PDAM Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengimbau kepada seluruh pelanggan, untuk menghemat penggunaan air," jelas Hamid.

Hal ini, kata Hamid, karena kemarau panjang di Kalimantan Timur. Dampaknya, debit air menurun tajam dan pendistribusian air bersih tidak berjalan secara normal.

"Sedangkan pada musim hujan seperti saat ini sering terjadi banjir karena curah hujan tahunan di PPU tergolong

cukup tinggi yaitu sekitar 2.223 milimeter dengan frekuensi 40,8% jumlah hari dalam setahun," kata Hamid Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS.

Pengelolaan SDA yang baik, ungkap Hamid, sangat dibutuhkan di PPU karena secara ilmiah wilayah calon IKN sebagian besar tersusun atas batu lempung dengan sisipan batu pasir yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan air sehingga menyebabkan run off/ air permukaan menjadi besar.

"Hal inilah yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air baku sekaligus besarnya potensi banjir di PPU, selain itu potensi banjir juga dapat disebabkan oleh air rob dari arah teluk Balikpapan," papar Hamid.

Dengan kondisi yang ada saat ini, lanjutnya, dimana terjadi eksploitasi alam besar-besaran di daerah tersebut, menyebabkan sulitnya masyarakat setempat merasakan kesejahteraan di bidang SDA.

"Dengan akan dipindahkannya IKN ke PPU, maka dikhawatirkan kondisi lahan justru menjadi semakin parah. Dimana diperkirakan lebih dari satu juta orang akan



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

"Fraksi PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak pindahannya IKN dan meminta kepada Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi"

masuk ke PPU, sehingga akan dibutuhkan hunian yang banyak serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya," pungkasnya.

Oleh sebab itu, ujar Hamid, adalah hal yang wajar jika saat ini banyak warga yang menolak pindahannya IKN ke PPU.

"Sehingga kami dari Fraksi PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak pindahannya IKN dan

meminta kepada Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi. Secara khusus Saya meminta kepada Pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU, khususnya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Air agar di PPU tidak terjadi banjir pada musim hujan dan tidak kekurangan air pada musim kemarau," tutup Hamid.

Aleg PKS: Ruas Tol Gedebage-Cilacap Akan Tingkatkan Ekonomi Priangan Timur

KUTIPAN

Tasikmalaya (07/01) --- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan pemenang pelelangan perusahaan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat memperkirakan ruas tol yang menghubungkan kawasan wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah bakal jadi yang terpanjang di Indonesia.

"Tol ini memiliki total panjang 206,65 Kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp56 triliun. Saya kira ini akan menjadi ruas tol yang paling Panjang di negara kita," ujar Politisi PKS asal Tasikmalaya ini.

Toriq ingin agar pemenang lelang proyek ruas Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap dapat melaksanakan pekerjaan proyek ini memiliki hasil dengan kualitas yang terbaik dan berstandar internasional.

Toriq menyebutkan, sela-

ma puluhan tahun masyarakat Priangan Timur maupun daerah PKS, Toriq Hidayat menuju Bandung maupun Cilacap harus melintasi jalan konvensional yang menanjak dan berkelok.

"Untuk menuju Bandung, kami harus melalui tanjakan Gentong dan Nagreg yang rawan longsor dan sering macet. Apalagi saat ini kendaraan yang melintas bertambah banyak dengan tonasi besar. Kondisinya semakin menghambat perjalanan dan waktu tempuh yang lama," tutur Toriq.

Harapan Dia dari pembangunan ruas tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap tersebut tentunya adalah lalu lintas kendaraan akan lebih lancar dan waktu tempuh menjadi lebih

singkat. Mobilitas orang maupun barang antarkota semakin mudah dan tidak melelahkan.

"Dan paling penting dengan kehadiran jalan tol diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Priangan Timur. Tidak heran, apabila beberapa kepala daerah di Priangan Timur saling mengusulkan posisi pintu tol di wilayahnya," ujar Toriq lagi.

Menurutnya agar harapan itu terwujud, sepatutnya pemerintah daerah dan masyarakat di Priangan Timur mulai berbenah dari sekarang. Kehadiran ruas tol ini dijadikan sebagai tantangan dan peluang, jangan sampai melemahkan atau malah menjadi ancaman.

"Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap merupakan proyek berskala besar. Tidak hanya dari jumlah anggaran, tetapi juga jumlah tenaga kerja yang akan terlibat. Saya kira hal ini, peluang awal yang mungkin dapat dinegosiasikan.

Pemerintah daerah yang mampu menyediakan tenaga kerja konstruksi akan mendapatkan peluang dari sektor ini," tutupnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

"Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap merupakan proyek berskala besar. Tidak hanya dari jumlah anggaran, tetapi juga jumlah tenaga kerja yang akan terlibat.

Saya kira hal ini, peluang awal yang mungkin dapat dinegosiasikan. Pemerintah daerah yang mampu menyediakan tenaga kerja konstruksi akan mendapatkan peluang dari sektor ini," tutupnya.

Kasus Omicron Bertambah, Aleg PKS: **Perketat** Pintu Masuk dan Ke Luar Negeri

KUTIPAN

Mataram (31/12) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi Jumlah kasus Covid-19 Omicron di Indonesia yang terus bertambah.

Kementerian Kesehatan (Kemkes), ujar Suryadi, sebelumnya mengumumkan kasus positif Covid-19 varian Omicron di Indonesia pada Rabu (29/12) bertambah 21 orang.

"Sehingga sampai saat ini jumlah kasus positif Covid-19 Omicron ada 68 orang. 21 kasus baru Omicron tersebut merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang terdiri dari 16 WNI dan 5 WNA," ujar pria yang akrab disapa SJP.

Disamping itu, kata SJP, Satgas Covid-19 mengumumkan tambahan kasus Covid-19 di tanah air pada (29/12) sebanyak 194 kasus.

"Tambahan ini lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya (28/12) yang tercatat 278 kasus. Artinya, penambahan kasus dari luar negeri patut segera diantisipasi," ungkapnya.

"FPKS meminta saatnya

menutup sementara jalur masuk luar negeri. Tren kasus yang menurun di Indonesia jangan sampai terpicu dengan para pendatang dari luar negeri," imbuhnya.

Sejauh ini, kata SJP, berdasarkan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 No. 26 Tahun 2021 per tanggal 25 Desember 2021, Indonesia telah menutup sementara masuknya warga negara asing (WNA) dari 13 negara, yaitu Inggris, Denmark, Norwegia dan 10 negara Afrika seperti Afrika Selatan.

"Namun, Kemenkes telah mengungkap lima kasus probable atau hasil tes yang menunjukkan tanda-tanda varian Omicron tersebut. Lima kasus tersebut terdiri dari dua Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan dari Amerika Serikat dan Inggris serta tiga Warga Negara Cina yang tiba di

Manado. Mereka telah menjalani tes PCR dengan penanda khusus dan berstatus probable Omicron," jelas Anggota Komisi V ini.

Jika sudah ditemukan kasus probable dari Cina, kata SJP, Indonesia seharusnya menutup penerbangan dari negara tersebut. Tambahan lagi, data dari Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAIID) per tanggal 16 Desember 2021 menyebutkan 10 negara dengan kasus Omicron terbanyak di dunia, beberapa belum masuk dalam SE No. 26/2021 di atas, yaitu Amerika Serikat, Swiss, Belgia, Australia, dan Jerman.

"Tertib protokol kesehatan tidak hanya menjadi slogan. Praktek pengawasan dari seluruh jalur masuk luar negeri tidak hanya pada jalur udara, tetapi juga jalur laut yang patut mendapatkan pendisiplinan. Kasus minggat pada saat karantina dari perjalanan luar negeri menjadi pembelajaran bagi kita untuk bersama-sama bertanggung jawab agar jangan sampai kasus positif Covid-19 varian Omicron di Indonesia meningkat tak terkendali," tutup SJP.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Tertib protokol kesehatan tidak hanya menjadi slogan. Praktek pengawasan dari seluruh jalur masuk luar negeri tidak hanya pada jalur udara, tetapi juga jalur laut yang patut mendapatkan pendisiplinan. Kasus minggat pada saat karantina dari perjalanan luar negeri menjadi pembelajaran bagi kita untuk bersama-sama bertanggung jawab agar jangan sampai kasus positif Covid-19 varian Omicron di Indonesia meningkat tak terkendali



Ketimpangan
Jawa-luar jawa
ketimpangan
ekonomi, **bukan**
ketimpangan
letak Istana



Yang perlu disebar adalah pusat
pertumbuhan perekonomian, bukan
menyebarkan lokasi pembangunan istana

**H. SURYADI JAYA
PURNAMA, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI

Aleg PKS Minta Harga Jual Minyak Goreng Subsidi **Sesuai HET,** Rp 11 Ribu Per Liter

KUTIPAN

Jakarta (08/02) --- Anggota Komisi VI DPR Amin Ak meminta pemerintah menerapkan harga minyak goreng yang telah disubsidi nantinya senilai Rp 11 ribu per liter.

Hal tersebut disampaikan Amin menyikapi rencana pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng dengan nilai Rp 14 ribu per liter di tingkat konsumen.

"Menegenai harga jual minyak goreng setelah disubsidi, seharusnya tetap mengacu pada Permendag No 7/2020, yang mengatur harga minyak goreng Rp 12.500 per kilogram atau sekitar Rp 11.000 per liter," kata Amin.

Selain itu, Amin pun meminta pemerintah komitmen pada rencana awal yang akan menerapkan subsidi 2 juta ton minyak goreng atau sekitar 25 persen dari total konsumsi minyak goreng nasional 8 juta ton per tahun.

"Jumlah subsidi 1,2 miliar liter atau sekitar 900 ribu ton,

jauh di bawah dari komitmen awal. Kalau pun subsidi diperpanjang dari enam bulan menjadi setahun, besaran subsidi hanya sekitar 1,8 juta ton atau masih lebih rendah dari rencana awal," papar Politikus PKS itu.

Menurutnya, dana subsidi untuk minyak goreng tidak memberatkan APBN, karena diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), berasal dari pungutan ekspor yang dipungut dari produsen minyak sawit mentah (CPO) atau dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF).

Dana ini dibayarkan produsen CPO saat harga komoditas di atas 570 dolar AS per ton, di mana hingga 17 Desember 2021, BPDPKS

berhasil menghimpun dana senilai Rp 69,72 triliun.

Selain itu, pada 2022 pendapatannya diperkirakan mencapai sekitar Rp 45 triliun, sehingga lebih dari cukup untuk menerapkan besaran subsidi sesuai komitmen awal.

"Subsidi juga rawan salah alokasi, meskipun niat awalnya adalah untuk menyediakan minyak goreng yang terjangkau bagi kelas bawah," ujarnya.

Amin menilai, pada kenyataannya akan sulit untuk mengawasi distribusi karena tidak ada batasan penjualan di toko ritel atau tempat lain, sehingga rumah tangga kelas menengah ke atas bisa membeli minyak goreng bersubsidi.

"Untuk menghindari masalah ini, ada rencana untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk menjamin pasokan CPO bagi produsen dengan harga yang telah ditentukan, sehingga produknya bisa terjangkau," tutur Amin.



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Jumlah subsidi 1,2 miliar liter atau sekitar 900 ribu ton, jauh di bawah dari komitmen awal. Kalau pun subsidi diperpanjang dari enam bulan menjadi setahun, besaran subsidi hanya sekitar 1,8 juta ton atau masih lebih rendah dari rencana awal"

Ratifikasi RCEP Indonesia Terlambat, **Aleg PKS: Ada Jeda Panjang dari Persetujuan Hingga Pembahasan**

KUTIPAN

Padang (07/01) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menanggapi paling lambat negara Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP),

dikarenakan terlalu jauhnya jarak antara persetujuan RCEP yang disetujui pemerintah periode sebelumnya pada November 2011, dengan Raker Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI pertama kali membahas masalah RCEP 25 Agustus 2021.

"RCEP disetujui awal pada November 2011, sedangkan peluncurannya pada November 2012. Pada tahun berikutnya, perundingan pertama di Brunei Mei 2013, sedangkan penandatanganan persetujuan RCEP 15 November 2020. Pelimpahan dokumen ratifikasi pada Januari 2021, dan Raker Kementerian Perdagangan

dengan Komisi VI pertama kali membahas masalah RCEP 25 Agustus 2021. Raker berikutnya dengan bahasan yang sama antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan pada pembahasan RCEP yang kedua pada 13 Des 2021", urai Nevi.

Politisi PKS ini akan mendorong, agar ratifikasi RCEP ini di Kuartal satu tahun 2022 dapat segera selesai. Nevi mengatakan, jangan sampai kita satu-satunya negara ASEAN yang belum meratifikasi dengan jangka waktu yang terlalu lama. Pemerintah diminta segera mengirimkan draf RUU nya ke DPR RI bulan ini untuk nantinya

dibahas oleh DPR sesuai masa reses masuk masa persidangan bulan Januari 2022 ini.

Sebagai catatan, Legislator asal Sumatera Barat ini meminta agar Pemerintah perlu memperbanyak program untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha UMKM dan meningkatkan kemampuan usaha para pelaku usaha UMKM sehingga mereka bisa melakukan ekspor produknya.

Selanjutnya Nevi juga mendorong agar ada percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi yang ini juga berimplikasi pada dorongan percepatan penyelesaian RUU perlindungan Data Pribadi dikarenakan akan semakin banyak transaksi yang akan menggunakan e-commerce.

"Yang perlu selalu diperhatikan dalam setiap melakukan Perjanjian Kerjasama perdagangan adalah sejauh mana perlindungan yang akan diberikan negara kepada para pelaku industri kecil. Jangan sampai masuknya para investor dan produk dari luar negeri berakibat semakin

**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Yang perlu selalu diperhatikan dalam setiap melakukan Perjanjian Kerjasama perdagangan adalah sejauh mana perlindungan yang akan diberikan negara kepada para pelaku industri kecil. Jangan sampai masuknya para investor dan produk dari luar negeri berakibat semakin sulitnya pelaku umkm dan pelaku industri dalam negeri untuk menjual produknya di negeri sendiri"

sulitnya pelaku umkm dan pelaku industri dalam negeri untuk menjual produknya di negeri sendiri. Pemerintah perlu memperbanyak program yang

membuat rakyat bangga menggunakan produk dari negerinya sendiri", tutup Nevi Zuairina.



Dampak Peleburan Lembaga Eks Kemenristek, Aleg PKS Minta Pemerintah **Perhatikan** Nasib Pegawai Non PNS

KUTIPAN

Jakarta (06/01) --- Pemerintah melakukan penataan sumber daya riset belakangan menuai kritik dan memakan korban.

Sebanyak 39 kementerian/ lembaga, termasuk eks Kemenristek, BATAN, BPPT, LAPAN, LIPI dan juga mencakup semua eks balitbang (badan penelitian dan pengembangan) maupun unit litbang di Kementerian atau Lembaga.

Peleburan sejumlah lembaga penelitian ke eks Kemenristek ke dalam tubuh BRIN berdampak pada diberhentikannya pegawai honorer, pegawai non-ASN, pegawai kontrak, dari BPPT, BATAN, LAPAN, LIPI, Lembaga Eijkman, Kapal Riset Baruna Jaya, dsb.

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengingatkan Pemerintah agar memperhatikan nasib para pegawai honorer, pegawai non-ASN, pegawai kontrak yang terkena dampak peleburan

jumlah kementerian/Lembaga.

Rofik mengatakan, Pemerintah dalam hal ini BRIN harus memperhatikan juga nilai-nilai kemanusiaan.

"Peleburan sejumlah lembaga penelitian eks Kemeristek ke dalam tubuh BRIN berdampak pada diberhentikannya pegawai honorer, pegawai non-ASN, pegawai kontrak. Banyak diantara mereka yang sudah bekerja puluhan tahun," kata Politis PKS itu

Pemerintah, imbuh Rofik, harus betul-betul memperhatikan nasib mereka, banyak dari mereka yang sudah bekerja puluhan tahun.

"Pemerintah seharusnya mencari cara yang lebih baik dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar tenaga kontrak ini tidak terabaikan hak-haknya. Apalagi saat masih

dalam proses recovery ekonomi karena dampak pandemi covid-19, pemerintah harus lebih sensitive," tambahnya

Selain itu, rofik juga juga meminta supaya integrasi peneliti ke BRIN dilakukan dengan cermat.

"Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk cermat dalam melakukan proses integrasi SDM peneliti ke lembaga BRIN. Hal ini karena sumber daya manusia terletak di sumber daya manusianya. Membangun ekosistem riset ini tidaklah mudah," kata Rofik

Rofik mengingatkan, lembaga-lembaga riset yang ada saat ini dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang lama. Akumulasi pengetahuan dan intellectual capital yang sudah dibangun dengan susah payah ini bisa hilang begitu saja ketika sumber daya manusianya tidak terakomodasi dalam kelembagaan BRIN.

"Sehingga proses integrasi lembaga riset ke BRIN ini dapat membuahkan sinergi dalam menciptakan sistem nasional



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah perlu mengakomodasi sebanyak mungkin SDM peneliti berupa kesempatan berupa formasi kepegawaian sehingga tidak ada sumber daya manusia unggul yang hilang. Tidak mudah untuk mendapatkan mendapatkan sumber daya manusia unggul seperti mereka ini"

ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar anggota Komisi VII dari Dapil Jawa Tengah VII ini.

Rofik menambahkan, sesuai dengan amanat UU No.11 Tahun 2009 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, peleburan lembaga riset ke dalam BRIN diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan

kegiatan penelitian dan penelitian; meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi kemiratan; meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional serta meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Larangan Ekspor Batubara Dicabut, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah **Mencla-mencle**

KUTIPAN

Jakarta (11/01) — Pembatalan kebijakan larangan ekspor batu bara mulai Rabu, 12 Januari 2022, menandakan Pemerintah tidak mempunyai dasar argumentasi yang kuat dalam membuat keputusan.

Jakarta (11/01) — Pembatalan kebijakan larangan ekspor batu bara mulai Rabu, 12 Januari 2022, menandakan Pemerintah tidak mempunyai dasar argumentasi yang kuat dalam membuat keputusan.

Akibatnya baru 10 hari kebijakan larangan ekspor itu diberlakukan kini harus dibatalkan. Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kepada media Selasa, (11/01).

Mulyanto menambahkan sebelum membuat kebijakan strategis harusnya Pemerintah membuat kajian komprehensif agar ketika kebijakan tersebut diberlakukan dapat diterima dengan baik.

"Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat jangan sekedar gertak sambar, yang akhirnya

mudah di lobby pengusaha. Faktanya baru sepuluh hari sejak ditetapkan pelarangan ekspor batu bara ini, kebijakan tersebut sudah dicabut kembali. Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak beribawa," kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut kebijakan yang diambil harusnya berbasis data komprehensif baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penyediaan batubara.

Karena berdasarkan fakta di lapangan, imbuhnya, yang nakal bukan hanya sebagian pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO dan tetap nekat mengeksport batubara, tetapi juga manajemen pengadaan batubara di sisi PLN.

"Jangan sampai ketika pengusaha teriak termasuk juga

negara-negara importir batu bara Indonesia, kita baru tergopoh-gopoh merespon dan mencabut pelarangan ekspor tersebut. Kondisi ini jelas akan merusak kewibawaan negara, baik di hadapan pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Kesannya Pemerintah kita mudah diatur dan ditekan," jelas Mulyanto.

"Ke depan, situasi ini harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah. Masak negara dengan sumber batu bara yang berlimpah kita kesulitan dalam penediaannya untuk listrik," imbuh Mulyanto.

Sebelumnya Pemerintah menerbitkan Perpres larangan ekspor batu bara selama satu bulan penuh. Pemerintah minta kepada semua perusahaan batu bara menjual komoditas produksinya ke PLN.

Tapi baru sepuluh hari kebijakan tersebut dilaksanakan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membatalkan kebijakan tersebut.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Jangan sampai ketika pengusaha teriak termasuk juga negara-negara importir batu bara Indonesia, kita baru tergopoh-gopoh merespon dan mencabut pelarangan ekspor tersebut. Kondisi ini jelas akan merusak kewibawaan negara, baik di hadapan pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Kesannya Pemerintah kita mudah diatur dan ditekan"

Keberangkatan Umrah Perdana, **Aleg PKS: Tingkatkan Kualitas Layanan dan Perlindungan Jema'ah**

KUTIPAN

Jakarta (12/01) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai keberangkatan umrah perdana yang diberangkatkan pada (08/01/2022) harus ditingkatkan dari segi kualitas layanan dan perlindungan Jema'ah Indonesia.

"Pemberangkatan jema'ah umrah dibuka kembali pada 8 Januari 2022. Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan umrah dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Dengan kuota yang masih terbatas saya menyampaikan untuk para Jema'ah umrah yang berangkat agar tetap menggunakan maskernya dan mencuci tangan", ujar Iskan.

Aleg asal Sibuhuan ini menambahkan Pemerintah khususnya Kementerian Agama harus memperhatikan perjalanan umrah dilaksanakan dengan tepat, jangan sampai

nantinya ada tingkatan lonjakan kasus Covid-19 kembali dan diharapkan juga keberangkatan Haji tahun ini dapat terlaksana.

"Ini satu nilai yang baik bagi masyarakat Indonesia dapat berangkat untuk menunaikan Ibadah Umrah yang mana sebelumnya terus diundur waktu keberangkatannya. Saya meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama agar Umrah tahun ini bisa berjalan maksimal untuk ke depannya, diperhatikan pelayanan kesehatannya baik sebelum keberangkatan atau pun sesudah keberangkatan dan juga semoga tidak ada lagi penundaan yang akan berdampak pada keberangkatan Haji tahun ini", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan menuturkan bahwa Kanwil Kementerian Agama pusat dan Kementerian Agama kabupaten atau kota harus melakukan pengawasan keberangkatan dan kepulangan jema'ah umrah di wilayah kerjanya.

"Proses verifikasi seperti sertifikasi vaksin, tes kesehatan, karantina dan screening kesehatan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, valid, akurat, serta menjamin kepatuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Arab Saudi," ujarnya.

Seerti yang telah tertuang di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Nomor 128 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

"Oleh karena itu, saya minta kepada Kementerian Agama untuk memastikan seluruh jema'ah umrah kita mendapatkan fasilitas dan pelayanan terbaik sebagai tamu Allah di tanah suci," pungkas Iskan mengakhiri.

**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**

Dapil Sumatera Utara II

“Pemerintah khususnya Kementerian Agama harus memperhatikan perjalanan umrah dilaksanakan dengan tepat, jangan sampai nantinya ada tingkatan lonjakan kasus Covid-19 kembali dan diharapkan juga keberangkatan Haji tahun ini dapat terlaksana. “

HNW **Apresiasi** Tuntutan Jaksa terhadap Terdakwa Pemerkosa 12 Santriwati dengan Hukuman Mati

KUTIPAN

Jakarta (11/01) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Kajati Jabar, Asep N Mulyana, yang tegas menyampaikan tuntutan maksimal berupa hukuman mati atau hukuman tambahan seperti dengan kebiri kimia dan denda, terhadap terdakwa pemerkosa 12 santriwati, Herry Wirawan.

"Hormat kepada Jaksa penuntut umum yang berani menuntut dengan tuntutan yang terberat, sebagai upaya memberikan ketegasan hukum berkeadilan, untuk membuat efek jera kepada pelaku dan pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa," ungkap HNW.

Tuntutan hukuman terberat itu, imbuhnya juga merupakan aspirasi masyarakat luas, sebagai pemberlakuan hukum yang tegas dan adil, atas kebiadaban yang dilakukan terdakwa, yang dalam waktu lama dan berulang, melakukan

pelanggaran hukum Negara dan hukum Agama terhadap 12 santriwati yang masih di bawah umur, yang semestinya dilindungi dan diberikan pendidikan.

"Penting bagi majelis Hakim untuk dapat menimbang secara jernih, hadirkan kewibawaan dan keadilan hukum, dengan mengabdikan tuntutan terberat itu," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (11/01).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dengan dakwaan pertama jaksa, yakni

Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Instrumen hukum yang ada sudah sangat cukup memadai untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Ini harusnya dilaksanakan, sesuai juga dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," ujarnya.

Karena, kata HNW, percuma saja Negara membuat UU yang bagus, dengan adanya ketentuan hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan untuk memberi efek jera, dan melindungi korban dan kemanusiaan, tetapi tidak digunakan secara maksimal oleh penegak hukum yang terlihat saat Hakim menyetukkan palunya.

"Sikap Jaksa penuntut umum dengan tuntutan maksimalnya ini layak diapresiasi. Tetapi akan jadi berarti bila dikabulkan oleh majelis Hakim melalui amar putusannya, dan agar menimbulkan efek jera, hendaknya vonis terberat itu



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Sikap Jaksa penuntut umum dengan tuntutan maksimalnya ini layak diapresiasi. Tetapi akan jadi berarti bila dikabulkan oleh majelis Hakim melalui amar putusannya, dan agar menimbulkan efek jera, hendaknya vonis terberat itu segera dieksekusi,"

segera dieksekusi," tukasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini mengaku akan terus memantau kasus ini, agar benar-benar juga memberikan keadilan

kepada korban, yakni 12 santriwati yang masih anak-anak, yang telah diregret masa depannya oleh kebiadaban terdakwa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Refleksi Akhir Tahun 2021, Legislator PKS Tagih Janji Presiden Jokowi

KUTIPAN

Jakarta (31/12) — Memasuki akhir tahun 2021, Anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2021.

Bukhori menyoroti beberapa janji Presiden Jokowi yang dinilai masih jauh dari realisasi selama dua periode kepemimpinan.

Pertama, Anggota Komisi VIII DPR RI itu menagih janji Presiden terkait susunan kabinet yang ramping saat pilpres 2014 lalu. Bukhori lantas menyanggah janji tersebut dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dimana dalam Perpres tersebut mengatur soal jabatan Wakil Menteri Sosial.

Anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial itu mengatakan, selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri dinilai belum mendasak. Apalagi, dalam keterangannya belum lama ini, Menteri Sosial Risma mengukuhkan posisi wakil menteri di instansinya

bukan atas dasar keinginannya, melainkan atas kewenangan Presiden.

"Bu Risma sudah cukup responsif dan menguasai setiap persoalan di Kementerian Sosial. Di sisi lain, kewenangan wakil menteri juga terbatas karena tidak mungkin dapat mengambil keputusan strategis bersama DPR. Kemudian dari segi koordinasi dan operasional, kinerja menteri sebenarnya telah terbantu dengan adanya seken, dirjen, maupun stafsus. Walhasil, posisi wamen ini patut dipersoalkan, karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi yang semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu, yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping," jelas

Bukhori di Jakarta, Kamis (30/12/21).

Kedua, politikus PKS itu menyoroti lemahnya komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Bukhori menyebut dicopotnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran tersandung kasus korupsi sepanjang tahun 2021 sebagai pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan saat perhelatan pilpres 2019 lalu. Menurutny, perbuatan keji yang melibatkan dua anak buah Presiden itu sebagai pengkhianatan terhadap janji politik, bahkan kepercayaan rakyat.

"Kasus korupsi bansos dan suap benur di saat pandemi barangkali menjadi sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh rezim dalam kaleidoskop 2021. Publik sulit melupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitik hati itu," tegasnya.

Anggota yang pernah duduk di Komisi Hukum itu mengamini bahwa kinerja pemerintah dalam memberantas KKN relatif melemah. Salah satunya tercermin dari Survei Nasional Kompas pada Oktober 2021



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Proyek mercusuar pemerintah yang berdampak pada bertambahnya beban utang negara bertolak belakang dengan janji Presiden yang pernah diucapkan. Nafsu untuk meninggalkan warisan pembangunan semestinya tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat maupun generasi mendatang akibat tumpukan utang yang kian menggunggung"

yang menunjukkan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas KKN turun di angka 57,8 persen dibandingkan survei sebelumnya pada April 2021 yang berada di angka 63,6 persen. Terpapanya International juga mencatat,

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami kemerosotan dari skor 40/100 pada 2019 menjadi 37/100 pada 2020.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan

Eijkman dilebur ke BRIN, Alifudin: Peneliti Jangan Terintervensi Kepentingan Politik

KUTIPAN

Jakarta (04/01) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, khawatir atas intervensi Lembaga Eijkman oleh Pemerintah lewat Badan Riset dan Inovasi Nasional, akan dampak penanganan Covid-19 terhadap vaksin merah putih.

Karena, kata Alifudin, di awal pandemi Covid-19, Eijkman salah satu lembaga yang mendorong agar dilakukan tes banding atas false negatif di Litbangkes.

"Dengan dileburnya ke BRIN, LBM Eijkman khawatir mudah diintervensi lewat kepentingan politik nantinya, karena pada dasarnya peneliti atau saintis itu harus terus memiliki daya kritis yang tinggi" ungkap Alifudin kepada wartawan, Senin (03/01/2021).

Alifudin menambahkan bahwa, jika nalar kritis peneliti diintervensi, nantinya akan menjadi keliru dalam mendapatkan hasil penelitian

yang mutakhir, khususnya untuk kasus Covid-19 yang sampai sekarang belum usai.

"Peleburan ini harus dilihat dari berbagai aspek, seperti para staf peneliti yang lulusan luar negeri ingin mengabdikan ke Indonesia, dengan bekerja di Eijkman, taunya di PHK tanpa pesangon, hal itu jangan sampai membuat pesimis para akademisi kita," tambah bang Alif.

Alifudin juga khawatir dengan BRIN yang arahnya akan menjadi kepentingan politik nantinya, karena salah satu Dewan Pengarah BRIN adalah Pimpinan Partai Politik. "Semoga BRIN dan

lembaga terkait yang dilebur tidak terikat dengan kepentingan atau intervensi politik belaka, kita semua berharap Covid-19 juga harus bersama diatasi," tutup Alifudin

Selain itu, soal Vaksin Merah Putih yang jadwal penyelesaian Uji Klinis diundur, alifudin pun berharap agar BRIN terus maju untuk menyukseskan penyelesaian Vaksin Merah Putih.

Lembaga Eijkman (WASCOVE) mengumumkan perpisahannya di awal 2022. Mulai 1 Januari 2022, kegiatan deteksi COVID-19 di PRBM Eijkman akan diambil alih oleh Kedeputusan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN.



H. ALIFUDIN, S.E., M.M.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Dengan dileburnya ke BRIN, LBM Eijkman khawatir mudah diintervensi lewat kepentingan politik nantinya, karena pada dasarnya peneliti atau saintis itu harus terus memiliki daya kritis yang tinggi. Jika nalar kritis peneliti diintervensi, nantinya akan menjadi keliru dalam mendapatkan hasil penelitian yang mutakhir, khususnya untuk kasus Covid-19 yang sampai sekarang belum usai. "

Dukung RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Wakil Ketua FPKS: Negara **Harus Akui** Kehadiran PRT

KUTIPAN

Menurut Netty, pengesahan RUU PPRT akan menjadi landasan bagi pekerja dan pemberi kerja melakukan kerja sama lebih baik, mencegah pekerja mengalami kekerasan dan ketidakadilan, serta memberikan perlindungan bagi PRT selama bekerja

Jakarta (12/01) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani mendukung segera ditetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi RUU Inisiatif DPR.

"RUU PPRT ini sangat mendesak untuk segera disahkan. Negara harus mengakui kehadiran PRT sebagai sebuah pekerjaan nyata. Jangan biarkan para PRT terus menunggu berpuh-puluh tahun tanpa adanya payung hukum yang jelas bagi pekerjaan mereka" ujar Netty, Selasa (11/01/2022).

Lebih lanjut Netty mengatakan bahwa RUU ini sudah diusulkan sejak tahun

2004 atau sekitar 18 tahun lalu, namun hingga kini statusnya masih juga belum jelas.

"Jangan salahkan jika masyarakat dan PRT bertanya-tanya kenapa sampai sekarang RUU ini belum bisa juga disahkan. Padahal ada RUU yang pembahasannya bisa secepat kilat seperti RUU Cipta Kerja. Apalagi kekerasan terhadap para PRT masih terus terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, kehadiran payung hukum bagi PRT semakin mendesak" katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, telah terjadi 2.300 kasus kekerasan terhadap PRT

sepanjang tahun 2005 sampai 2020. Kekerasan itu berupa kekerasan fisik, psikis dan kekerasan ekonomi.

Menurut Netty, pengesahan RUU PPRT akan menjadi landasan bagi pekerja dan pemberi kerja melakukan kerja sama lebih baik, mencegah pekerja mengalami kekerasan dan ketidakadilan, serta memberikan perlindungan bagi PRT selama bekerja. RUU ini juga kelak menjadi payung hukum saat pekerja dan pemberi kerja bermasalah. Banyak dari para pemberi kerja yang melakukan kontrak kerja langsung dengan PRT tanpa ada standarisasi hak dan kewajiban, jam kerja, dan bentuk perlindungan" katanya.

Oleh karena itu, Netty bersama Fraksi PKS mendesak agar RUU PPRT segera ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dan disahkan. Pada perjalanannya telah dilakukan studi riset di sepuluh kabupaten/kota, uji publik di tiga kota, hingga studi banding ke dua negara dalam proses pembahasan RUU PPRT di Baleg.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Jangan salahkan jika masyarakat dan PRT bertanya-tanya kenapa sampai sekarang RUU ini belum bisa juga disahkan. Padahal ada RUU yang pembahasannya bisa secepat kilat seperti RUU Cipta Kerja. Apalagi kekerasan terhadap para PRT masih terus terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, kehadiran payung hukum bagi PRT semakin mendesak"

Vaksin Booster Dimulai, Aleg PKS: **Jangan Abaikan** Ketuntasan Vaksin Dosis 2 dan Vaksin Anak

KUTIPAN

Jakarta (05/01) --- Pemerintah merencanakan melaksanakan suntikan vaksin Covid-19 ketiga (vaksin booster) mulai 12 Januari 2022.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar vaksin booster tidak melalaikan fokus pencapaian target 70 persen suntikan dosis kedua. Termasuk program vaksin anak 6-11 tahun yang sedang dimulai.

Dari dashboard vaksin Kemenkes per 3 Januari 2022, vaksinasi nasional dosis 1 mencapai 79,87 persen dan dosis 2 baru 54,88 persen.

"Rencana vaksin booster jangan sampai melalaikan fokus pencapaian vaksinasi nasional. Dosis kedua baru 54,88 persen dari target 70 persen. Artinya prioritas utama belum selesai," ungkap Mufida dalam keterangannya, Rabu (05/01/2022).

Mufida meminta jumlah kebutuhan vaksin booster dikaji lebih seksama termasuk yang kelompok sasaran spesifik yang

membutuhkan.

"Harus dikaji betul seberapa besar kebutuhan booster. Karena sebagian epidemiolog mensinyalir Indonesia sudah mencapai herd immunity yang diantaranya berasal dari kekebalan yang muncul dari dalam tubuh pada penyintas covid. Jumlah penyintas covid ini diyakini cukup banyak diluar data resmi yang dilansir pemerintah," papar Mufida.

Mufida pun mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan vaksin booster sebagai ajang bisnis bagi sekelompok orang yang menjadi peingimpor vaksin dengan kembali mengimpor vaksin dalam jumlah besar.

"Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Kalau memang harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat

terutama menengah ke bawah. Kalau ada perusahaan vaksin yang ingin melakukan vaksin booster mandiri bagi karyawannya, boleh-boleh saja, selama tidak memotong dari gaji karyawannya," ungkap dia.

Apalagi pemerintah memberikan harapan ada skema vaksin booster gratis jika menggunakan vaksin Moderna dan Pfizer bisa cukup setengah dosis.

"Demi asas keadilan sosial jika gratis, maka semua harus gratis," ungkap dia.

Mufida meminta agar dioptimalkan pengembangan vaksin di dalam negeri, melanjutkan pengembangan vaksin merah putih sebagai vaksin booster. Saat ini pengembangan vaksin Merah Putih baru menuju uji klinis fase 1 pada awal Februari 2022.

"Maka timeline produksi vaksin merah putih sebagai booster harus dipercepat, perlu ada intervensi untuk mempercepat produksi vaksin merah putih agar tidak bergantung dengan vaksin booster impor. Terlebih jika pelepasan Lembaga Eijkman



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Kalau memang harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat terutama menengah ke bawah. Kalau ada perusahaan vaksin yang ingin melakukan vaksin booster mandiri bagi karyawannya, boleh-boleh saja, selama tidak memotong dari gaji karyawannya

yang dikhawatirkan semakin mengulur waktu produksi vaksin merah putih," urainya.

Mufida pun meminta agar data vaksinasi nasional juga benar-benar harus tepat. Belajar dari permasalahan joki vaksin,

data cakupan vaksinasi antardaerah yang kurang tepat dan pemberian vaksin booster kepada orang yang bukan prioritas, maka ini harus diperbaiki dan jangan terulang lagi.

Baleg FPKS : Pengesahan RUU TPKS Perlu Bersamaan RUU KUHP Agar Tidak Bermakna ‘Sexual Consent’

KUTIPAN

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk menjadi Hak Inisiatif DPR, perlu dilakukan bersamaan dengan pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah carry-over di periode DPR RI 2014-2019.

Hal itu, menurut Ledia, agar RUU TPKS tersebut tidak menjadi legitimasi adanya persetujuan seksual (sexual consent) yang bertentangan dengan norma Sila Pertama di Pancasila.

“Kita berpikir bahwa agar RUU TPKS ini tidak bermakna sexual consent, maka ada solusi yang kita tawarkan. Sama-sama kita sahkan bareng dengan RUU KUHP yang seharusnya di carry-over dari periode lalu,” ujar Ledia dalam diskusi yang disiarkan oleh salah satu lembaga riset via kanal Youtube pada Senin

(10/1/2022). Siaran itu dikutip Parlemenaria pada Selasa (11/1/2022).

Menurut Ledia, substansi perdebatan RUU TPKS tersebut adalah pada soal bab pidana tentang kekerasan dalam hubungan badan, baik yang dilakukan dalam koridor sah suami/istri atau non sah suami/istri. Dengan kata lain, jika hubungan badan tersebut dilakukan dalam koridor persetujuan suka sama suka, meskipun non suami/istri yang sah, selama tidak terjadi kekerasan, maka tidak dapat

dipidana. “Padahal kita tahu dalam Negara Pancasila ini ada Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan perilaku tadi,” ujar Ledia.

Karena itu, tambah Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini, RUU TPKS belum perlu untuk disahkan saat ini, mengingat terdapat tiga hal yang berkaitan dengan persoalan pidana, yaitu Kekerasan, Kebebasan, dan Penyimpangan Seksual. Jika hanya satu aspek kekerasan saja yang dibahas, maka akan timbul pemahaman yang berkaitan dengan sexual consent tersebut.

“Jadi tiga hal itu sebenarnya sudah diatur dalam RUU KUHP yang pada September 2019 sudah mau disahkan, namun ditarik Presiden untuk tidak dilanjutkan dibahas. Padahal waktu itu sudah masuk pembahasan tingkat I, bertahun-tahun dibahas, sudah bisa diselesaikan sebetulnya. Atau tiga norma itu dimasukkan ke dalam RUU TPKS sehingga menjadi satu kesatuan,” ujar mantan Ketua Panja Revisi Pertama RUU Perlindungan



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Kita berpikir bahwa agar RUU TPKS ini tidak bermakna sexual consent, maka ada solusi yang kita tawarkan. Sama-sama kita sahkan bareng dengan RUU KUHP yang seharusnya di carry-over dari periode lalu”

Anak ini.

Dengan demikian, urai Anggota Komisi X DPR RI ini, pemahaman terhadap tiga norma di atas dapat selaras dengan Keputusan MK tahun 2017, khususnya Pasal 284, yang menegaskan bahwa kewenangan

untuk merumuskan tindak pidana baru, termasuk perluasan pemaknaan terhadap zina, berada di tangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RAPAT PARIPURNA

Rapat Paripurna ke-12 DPR RI
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022



H. SUKANTA, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam

INTERUPSI

FPKS **Dukung** RUU TPKS Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945

“Kami Fraksi PKS mengusulkan agar nilai-nilai dan isi dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melarang seluruh perilaku seksual yang bertentangan dengan aturan Tuhan YME, adat budaya nilai ketimuran seperti Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks (LGBTi), perzinahan (hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan) karena negara kita negara Pancasila yang berketuhanan YME.”

Wakil Ketua FPKS Dukung RUU TPKS Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945

KUTIPAN

Jakarta (11/01) --- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melaksanakan Rapat Paripurna beragendakan Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022.

Dalam Rapur kali ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyampaikan interupsi mengenai salah satu RUU yang akan dibahas dalam masa sidang kali ini yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pernyataan Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Di Yogyakarta ini sesuai dengan pendapat mini Fraksi Partai Keadilan dalam mendukung disahkannya RUU TPKS yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

"Kami Fraksi PKS mendorong agar RUU Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan. Kami ingin seluruh

bentuk kekerasan seksual dilarang hadir di negeri Pancasila, Indonesia," terang Sukamta.

Sukamta menambahkan, pihaknya juga mengusulkan agar nilai-nilai dan isi dalam RUU Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melarang seluruh perilaku seksual yang bertentangan dengan aturan Tuhan YME, adat budaya nilai ketimuran seperti Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks (LGBTI), perzinahan (hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan) karena negara kita negara Pancasila yang berketuhanan YME.

"Kami PKS sepakat dengan arahan ibu Megawati

Soekarno Putri selaku Pembina BPIP, hendaknya DPR kalau membuat UU sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila maka, RUU PKS ini tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945," jelas Sukamta.

Sukamta, pada awal interupsinya mengutip sebuah pemberitaan mengenai kejadian sebuah keluarga yang mengalami masalah dengan garis keturunannya dan baru diketahui setelah tes DNA beberapa tahun kemudian.

"Permasalahan status anak, keluarga berdasarkan garis keturunan darah akan menjadi masalah sosial di kemudian hari apabila di dalam RUU TPKS tidak secara tegas melarang adanya hubungan seksual suka sama suka tanpa ikatan pernikahan," sebutnya.

Fraksi PKS, kata Sukamta, menolak segala bentuk kekerasan seksual dan menolak juga hubungan seksual atas dasar suka sama suka diluar status pernikahan.

"Fraksi PKS berkomitmen nyata menentang TPKS dengan



H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam

"Fraksi PKS menolak segala bentuk kekerasan seksual dan menolak juga hubungan seksual atas dasar suka sama suka diluar status pernikahan. Fraksi PKS berkomitmen nyata menentang TPKS dengan membentuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, psikologi bagi korban kekerasan seksual serta terus menggaungkan kampanye penolakan hubungan seksual di luar pernikahan,"

membentuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, psikologi bagi korban kekerasan seksual serta terus menggaungkan

kampanye penolakan hubungan seksual di luar pernikahan," terangnya.

Fraksi PKS Meminta RUU PRT **ditetapkan** Jadi Inisiatif DPR

KUTIPAN

"RUU PRT telah diajukan sejak tahun 2004 dan sudah melewati 3 (tiga) periode masa keanggotaan DPR." disampaikan Adang dalam Paripurna DPR (11/1) di Gedung DPR RI

Jakarta (11/1) Anggota Badan Legislatif DPR RI Adang Daradjatun menyampaikan dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah (RUU PPRT) dapat segera ditetapkan menjadi RUU Inisiatif DPR.

"RUU PRT telah diajukan sejak tahun 2004 dan sudah melewati 3 (tiga) periode masa keanggotaan DPR." disampaikan Adang dalam Paripurna DPR (11/1) di Gedung DPR RI

Adang menambahkan RUU PRT telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2022 no 16. Pengesahan bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja melalui implementasi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan kemanusiaan yang terkandung di dalam RUU PPRT.

"Perlindungan bagi pekerja rumah tangga dinilai perlu dibentuk dan diperkuat dalam wujud undang-undang. Sebab, peraturan perundangan yang selama ini ada dinilai belum cukup mengakomodasi sebagai payung hukum bagi para pekerja rumah tangga dan pemberi kerja" Pungkas Adang.



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Perlindungan bagi pekerja rumah tangga dinilai perlu dibentuk dan diperkuat dalam wujud undang-undang. Sebab, peraturan perundangan yang selama ini ada dinilai belum cukup mengakomodasi sebagai payung hukum bagi para pekerja rumah tangga dan pemberi kerja"

Harga Bahan Pokok Masih Tinggi, **Aleg PKS: Jangan Kelola Urusan Pangan dengan Paradigma Bisnis, Tapi Pendekatan Perlindungan Masyarakat**

KUTIPAN

Menurut Anggota Dewan asal Dapil Sumbawa ini, dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, Pemerintah wajib menjaga stabilisasi, pasokan dan harga bahan makanan pokok dan distribusi untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Jakarta (11/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan dalam sidang paripurna DPR RI Selasa (11/01), menanggapi melambungnya harga sejumlah komoditas bahan pangan akhir-akhir ini.

Menurut Anggota Dewan asal Dapil Sumbawa ini, dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, Pemerintah wajib menjaga stabilisasi, pasokan dan harga bahan makanan pokok dan

distribusi untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

“Atas amanat Undang-undang ini, harusnya Pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan masyarakat. Tapi sayangnya, selama ini persoalan pangan terutama meroketnya sejumlah komoditas pangan terus terjadi setiap tahun tanpa bisa kita kendalikan,” ungkap Johan.

Karena itu, imbuh Johan,

pihaknya mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala aspek tentang pangan secara lebih luas, secara lebih baik, sistematis, dan berpihak pada kepentingan petani dan seluruh rakyat.

“Jangan kelola urusan pangan dengan paradigma bisnis saja, tetapi harus dengan pendekatan perlindungan pada masyarakat. Karenanya, izinkan saya dalam forum terhormat ini, saya mengusulkan agar ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga bahan pokok dalam kerja besar penanganan pandemi covid-19. Percuma kita vaksin dan berktivitas apapun, kalau rakyat lapar maka pandemi ini tidak bisa dapat ditangani dengan baik,” tutup Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

“Jangan kelola urusan pangan dengan paradigma bisnis saja, tetapi harus dengan pendekatan perlindungan pada masyarakat. Karenanya, izinkan saya dalam forum terhormat ini, saya mengusulkan agar ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga bahan pokok dalam kerja besar penanganan pandemi covid-19. Percuma kita vaksin dan berktivitas apapun, kalau rakyat lapar maka pandemi ini tidak bisa dapat ditangani dengan baik,”



Profil

- Nama Lengkap
Saadiah Uluputty, ST.
- Tempat, Tanggal Lahir
Negeri Lima, 7 April 1973
- Dapil
Maluku



Pendidikan

- SMA Negeri Hila,
Kaitetu -
Maluku Tengah
- S1 Teknik Kelautan,
Insitut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS)-Surabaya



Keluarga

- Suami : **Abdullah Wahid**
- Anak : **3 Laki-Laki**
3 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- Anggota FPKS DPR RI,
2019-2024
- Sekretaris FPKS MPR RI,
2019-2024
- Ketua Komisi D DPRD
Provinsi Maluku, 2014-2019
- Sekretaris FPKS DPRD
Provinsi Maluku, 2009-2014
- Direktur CV Puteri Liki-Liki
Maluku, 2002-2009



Riwayat Organisasi

- Ketua Keputrian LDK Unpatti, 1997
- Ketua Kastrat KAMMI Daerah Maluku, 1998
- Ketua Kajian Strategi KAMMI Maluku, 1997-1999
- Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Maluku, 2010
- Sekretaris Dewan Syariah Wilayah
DPW PKS Maluku, 2015
- Bendahara DPD PKS Maluku Tengah, 2004
- Dewan Pakar Hena Hetu Maluku, 2016
- Pembina Hetu Upu Ana Maluku, 2016

SAADIAH ULUPUTTY



Media Sosial

- Facebook : **Saadiah Uluputty**
- Twitter : **@Saadiah Uluputty**
- Instagram : **@uluputtysaadiah**

Jalan Lingkungan Perum GPA 2 Diaspal, Rofik Wujudkan Harapan Warga

KUTIPAN

Purbalingga (04/01) --- Warga Perumahan Griya Perwira Asri (GPA) 2 khususnya di wilayah RT 41 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, Jawa Tengah, merasa gembira.

Hal itu karena jalan di lingkungan yang sebelumnya rusak, akhirnya dapat diperbaiki melalui program aspirasi Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto.

Perbaikan jalan lingkungan dengan pengaspalan ini merupakan program bantuan CSR BUMN melalui kerja sama antara Rofik Hananto dengan mitra Komisi VII DPR RI. Saat ini pengaspalan jalan yang semula jalan paving itu sedang dikerjakan sejumlah pekerja.

Salah satu warga Rahmat Aripin mengaku gembira dengan perbaikan jalan di wilayahnya.

"Ini menjawab harapan warga selama 5 tahun terakhir ini yang berharap ada perbaikan jalan," kata Aripin yang sudah 11 tahun tinggal di perumahan itu.

Dia menambahkan, pengaspalan jalan itu menjadi jawaban atas iktiar warga untuk memperbaiki jalan lingkungan. Karena kondisinya parah dan membuat ketidaknyamanan warga yang beraktivitas.

"Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rofik Hananto yang menjadi wakil kami di DPR RI dan telah menjembatani kami untuk bisa memperbaiki jalan tersebut," katanya.

Ketua RT 41 RW 06 Rastoko Waluyo mengatakan, saat ini pekerjaan pengaspalan jalan sudah hampir 75 persen selesai.

"Mewakili warga perumahan GPA 2 saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rofik Hananto dengan adanya bantuan dana

perbaikan pengaspalan jalan perumahan. Ini akan mempermudah aktivitas sehari-hari warga," katanya.

Untuk volume pekerjaan adalah 2.400 meter persegi, dan sudah mendapat bantuan volume hampir 950 meter persegi. Untuk kekurangannya akan dilakukan secara swadaya.

Rofik mengatakan, bantuan ini adalah tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh warga kepada nya.

"Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi warga yang disampaikan warga perumahan GPA 2 kepada kami, kami berusaha agar apa yang diinginkan warga dapat kita wujudkan dengan berkolaborasi dengan mitra kerja kami di DPR RI." Kata Rofik

Rofik juga mengapresiasi warga yang bergotong royong untuk memperbaiki jalan lingkungan ini.

"Kami mengapresiasi semangat gotong royong warga di lingkungan ini, meski belum dapat memenuhinya semua, ternyata warga juga berinisiatif untuk memenuhinya dari hasil swadaya masyarakat sekitar, sehingga jalan ini dapat segera



H. ROFIK HANANTO, S.E.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi warga yang disampaikan warga perumahan GPA 2 kepada kami, kami berusaha agar apa yang diinginkan warga dapat kita wujudkan dengan berkolaborasi dengan mitra kerja kami di DPR RI



diperbaiki." Kata pria yang akrab dipanggil mas Rofik.

"Saya berharap, dengan diperbaikinya jalan ini

masyarakat akan lebih mudah beraktivitas dan lebih nyaman." Tambahnya.

Saat Reses, Toriq Serahkan Mobil Layanan Masyarakat untuk Warga Di Dapil

KUTIPAN

Serah terima dilakukan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (03/01/2021).

Tasikmalaya (04/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil XI Jawa Barat Toriq Hidayat memberikan bantuan mobil untuk pelayanan masyarakat di Dapil.

Serah terima dilakukan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (03/01/2021).

"Saya berharap mobil layanan yang telah menggunakan logo PKS baru, akan membuat masyarakat di Kota Tasikmalaya khususnya, semakin kenal dengan logo bulat orange-nya PKS. Namun konsisten dengan karakter kuat PKS, yakni selalu hadir melayani masyarakat," ujar dia.

Mobil layanan peruntukkan Kabupaten Garut akan diserahkan kemudian.

Toriq berharap karakter melayani, konsisten menjadi ciri kuat kader PKS di setiap jenjang kepengurusan mulai dari tingkat pusat hingga ranting yakni kelurahan dan desa.

"Seperti halnya tujuannya, mobil layanan ini akan membantu pengurus dan kader PKS lebih dekat lagi dengan masyarakat, khususnya di dapil Jabar XI, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta Kabupaten Garut," sebut Anggota Komisi V DPR RI ini.

Pria yang tinggal di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ini meminta, agar kader selalu menjunjung garis kebijakan PKS yakni menebarkan nilai-nilai kebermanfaat dan kebijakan di tengah masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi rahmat bagi

semua.

"Keberadaan Islam yang juga menjadi dasar politik PKS, merupakan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karenanya kader PKS harus berusaha membuktikan cintanya kepada Allah dengan mencintai sesama manusia," jelas Toriq.

Mobil layanan masyarakat tersebut langsung diterima salah satunya oleh Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya, Dede, beserta segenap jajaran pengurus.

"Bantuan ini semakin menambah motivasi kerja-kerja Kami dalam rangka mencapai 100 persen dukungan masyarakat Kota Tasikmalaya kepada PKS dimasa yang akan datang," sebut Dede.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Saya berharap mobil layanan yang telah menggunakan logo PKS baru, akan membuat masyarakat di Kota Tasikmalaya khususnya, semakin kenal dengan logo bulat orange-nya PKS. Namun konsisten dengan karakter kuat PKS, yakni selalu hadir melayani masyarakat,





Kunjungan ke Kawasan Banjir Aceh, **Nasir Djamil: Pastikan Situasi Kondusif dan Bantuan segera Tersalurkan**

KUTIPAN

Aceh (06/01) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil melakukan kunjungan ke beberapa lokasi untuk memastikan kondisi masyarakat di Aceh Utara dan Aceh Timur, Rabu (05/01/2022).

Nasir Djamil memantau kondisi Polsek Lhoksukon yang terendam banjir dengan harapan kerja polisi di lapangan tetap dijalankan dengan baik.

Beralih ke Lapas Kelas II B Lhoksukon dengan menggunakan transportasi becak warga, Nasir sampai setempat dan melihat langsung situasi dalam lapas, memprioritaskan kesehatan, sanitasi dan makanan bagi warga binaan diakses dengan baik tanpa kendala ditengah banjir melanda kawasan itu.

Berpindah ke Aceh Timur, Nasir berjalan menembus banjir mengunjungi warga Gampong Teupin Breuh Kecamatan Simpang Ulim.

“Saya merasa prihatin, semoga banjir ini cepat surut dan warga bisa beraktivitas dengan normal” ujar Nasir

Warga yang mengunjungi balai desa dalam kesempatan itu menghampiri Nasir yang berada di lokasi setempat, warga menyampaikan aspirasi mereka agar kiranya ada atensi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi.

Permasalahan tanggul yang jebol misalnya, harapan warga ada perhatian dari pihak berwenang untuk membuat tanggul yang kuat dan mampu menaham volume air berlebih di tengah situasi cuaca yang tidak menentu.

Warga setempat mengkhawatirkan kehidupan mereka jika tidak adanya solusi yang tepat atas permasalahan banjir ini.

Politisi PKS itu membersamai warga dengan menyalurkan bantuan pangan secara langsung. Ia berharap warga bisa bertahan dalam situasi yang tidak mudah tersebut. Tetap mengedepankan optimisme bahwa permasalahan banjir akan mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah.

“Saya berharap masyarakat terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga perihal distribusi logistik pangan tidak ada kendala,” kata Nasir.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

“Saya merasa prihatin, semoga banjir ini cepat surut dan warga bisa beraktivitas dengan normal. Saya berharap masyarakat terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga perihal distribusi logistik pangan tidak ada kendala,”





Peduli ODGJ, Nur Azizah Berikan Santunan Panti Sosial Rehabilitasi Mental di Bekasi

KUTIPAN

Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam rangkaian Agenda Reses Anggota DPR RI Tahun 2021-2022 pada Rabu (22/12),

meninjau Panti Sosial Rehabilitasi Mental, di bawah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Jamrud Biru, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pada kesempatan ini Nur Azizah memberikan santunan untuk pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di panti ini yang mayoritas merupakan ODGJ yang terlantar dan dirawat oleh pemilik yayasan.

Masalah ODGJ ini harus menjadi perhatian khusus Kemensos. Menurut Nur Azizah, saat ini masih banyak ODGJ yang terlantar di jalan. Dengan dukungan khusus dari Kemensos kepada panti rehabilitasi khusus ODGJ ini dapat menjadi solusi, bagi para ODGJ terlantar.

“Secara khusus memang masih minim perhatian bagi ODGJ, tidak hanya yang terlantar tidak memiliki keluarga, yang memiliki keluarga pun, masih minim

kesadaran untuk melakukan rehabilitasi khusus. Hal ini karena masih minimnya informasi, dan sarana rehabilitasi bagi ODGJ yang dapat diakses dengan mudah dan gratis.”, jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan, seperti halnya Yayasan Jamrud Biru ini, dirintis secara sukarela oleh relawan yang peduli kesejahteraan ODGJ. Sebanyak 160 pasien yang saat ini melakukan rehabilitasi, dibiayai secara sukarela oleh donatur. Dan setiap bulannya, Yayasan dapat menyembuhkan 5 hingga 6 pasien. Nur Azizah mendukung kelak akan semakin banyak Yayasan seperti ini, tentu dengan didukung penuh dari pemerintah.

Pada kesempatan ini, Subartono, Pendiri Yayasan Jamrud Biru, sudah merintis Yayasan ini sejak tahun 2009. Ia menuturkan, Yayasan ini

fokus untuk mengurus dan mengobati para ODGJ yang terlantar di jalanan “kami merawat ODGJ terlantar. Harapan kami, dikarenakan kami tempatnya masih ngontrak, kami ingin ada lahan untuk bisa lebih luas mengurus ODGJ, agar tidak menjadi liar di jalanan, kami butuh dukungan penuh dari berbagai pihak khususnya pemerintah”, jelas Subroto.

Subroto menambahkan, setiap harinya Yayasan Jamrud Biru dapat menghabiskan dana sekitar 2-3 juta rupiah untuk makan dan perawatan pasien. Pasien berasal dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, dan yang terjahat berasal dari NTT.

Kami sangat memperhatikan dari segi kebersihan, panti ini tidak bau sama sekali, semua pasien perlahan di ajari cara merawat diri. Mandi harus 2 kali sehari, kebersihan ruangan selalu diperhatikan. “Pasien kami ajarkan untuk mandiri sambil terus diberikan terapi dengan totok saraf, rukaiyah, minum ramuan herbal dan dzikir ayat-ayat al-Quran”, kata Subroto. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Secara khusus memang masih minim perhatian bagi ODGJ, tidak hanya yang terlantar tidak memiliki keluarga, yang memiliki keluarga pun, masih minim kesadaran untuk melakukan rehabilitasi khusus. Hal ini karena minimnya informasi, dan sarana rehabilitasi bagi ODGJ yang dapat diakses dengan mudah dan gratis.”



Hermanto Tutup Tahun 2021 dengan Road Show Serahkan Bantuan di Tanah Datar

KUTIPAN

"Sebenarnya bantuan serupa diserahkan juga ke daerah-daerah lain di dapil Sumbar I. Hanya memang tanggal 31 Desember 2021 jadwalnya di Kabupaten Tanah Datar," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Padang (01/01) — Pada penghujung tahun 2021, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto melakukan roadshow menyerahkan bantuan Pemerintah untuk petani dan pembudidaya ikan di Kabupaten Tanah Datar.

Bantuan yang diserahkan berupa kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) dan Bioflok (sistem pemeliharaan ikan intensif). Bantuan P2L diserahkan kepada 2 kelompok.

Pertama kepada kelompok wanita tani (KWT) Mekarsari, Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab. Kedua kepada KWT Sungai Basa, Nagari Balimbing, Kecamatan

Rambatan. Sedangkan bantuan Bioflok diserahkan kepada pembudidaya ikan Yayasan Srikandi Rabbani, Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan.

"Sebenarnya bantuan serupa diserahkan juga ke daerah-daerah lain di dapil Sumbar I. Hanya memang tanggal 31 Desember 2021 jadwalnya di Kabupaten Tanah Datar," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Di tahun 2022, menurutnya, bantuan untuk masyarakat lingkup pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan akan tetap ada.

"Bantuan untuk

masyarakat menunjukkan bahwa negara ada dan mendukung semua aktivitas positif masyarakat," ujar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Apalagi untuk petani, lanjutnya, negara patut memberikan apresiasi atas kontribusinya bagi pertumbuhan positif sektor pertanian di tengah pertumbuhan negatif sektor lain dimasa pandemi covid-19 ini.

"Bantuan untuk petani merupakan apresiasi sekaligus perhatian negara kepada para petani," pungkas legislator Komisi IV DPR RI ini.

Dalam rangkaian penyerahan bantuan di Tanah Datar, Hermanto didampingi tiga tokoh setempat Adib Fadhill, Ade Raunas dan Firdaus Agus.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Bantuan untuk masyarakat menunjukkan bahwa negara ada dan mendukung semua aktivitas positif masyarakat, Apalagi untuk petani, lanjutnya, negara patut memberikan apresiasi atas kontribusinya bagi pertumbuhan positif sektor pertanian di tengah pertumbuhan negatif sektor lain dimasa pandemi covid-19 ini."

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*





Menunjang Berbagai Aktivitas Kalangan Milenial, Nevi Dorong Kegiatan Positif di Masyarakat

KUTIPAN

Pariaman (06/01) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina memberi dukungan para kalangan muda Sumatera Barat di berbagai kabupaten Kota yang positif bersentuhan dengan sosial kemasyarakatan dan kreativitas.

"Alhamdulillah, anak-anak muda ini gak ada habisnya ide dan kreativitasnya. Ini perlu di arahkan sehingga kegiatan-kegiatannya dapat bermanfaat selain untuk diri mereka sendiri karena pengalaman yang terus bertambah, juga untuk orang lain karena menerima semua kabikan dari aktivitas mereka", tutur Nevi.

Sumbangsih dari politisi PKS ini sangat beragam pada aktivitas anak-anak muda milenial di Sumatera Barat. Mulai dari aktivitas olah raga, aktivitas seni, keagamaan, hingga sosial kemasyarakatan.

"Semua ini dilakukannya dengan alasan, bahwa

kepedulian terhadap anak muda ini sangat tinggi, karena saya berharap kedepannya mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menggantikan orang-orang yang saat ini menduduki posisi strategis di berbagai sektor," ungkapnya.

di Kota Pariaman, Nevi langsung hadir pada gerakan peduli sosial. Selain sumbangan yang ia berikan, membuka gerai sebagai pos pemberian pakaian layak pakai. Di Kecamatan Pariaman Utara, ia memberi seragam remaja masjid IRMAM.

Nevi menambahkan, di Pasaman Barat, untuk menggalakkan olah raga di

kalangan muda, ia memberikan seragam-seragam untuk oleh raga bola khaki.

Kompetisi-kompetisi yang terjadi pada permainan olah raga ini semakin marak dan bergeliat untuk meningkatkan skill dan sportifitas.

"Saya merasa tenang ketika anak-anak muda ini masuk pada pergaulan yang positif dengan berbagai aktivitas yang beragam. Energi mereka yang begitu besar dapat tersalurkan dengan baik yang membuat bangga baik dari keluarga mereka maupun masyarakat di sekitarnya. Saya kan terus mendukung dan mendorong mereka untuk bergerak, berkegiatan dan berkinerja untuk sekaligus menempa kemampuan dan pemikiran mereka untuk menjadi apa yang hendak mereka jalani mulai dari negarawan, pengusaha, pendidik, ilmuwan bahkan politisis", Tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Saya merasa tenang ketika anak-anak muda ini masuk pada pergaulan yang positif dengan berbagai aktivitas yang beragam. Energi mereka yang begitu besar dapat tersalurkan dengan baik yang membuat bangga baik dari keluarga mereka maupun masyarakat di sekitarnya"



Kunjungi Dapil, SJP Resmikan Jembatan Gantung di Lombok Timur

KUTIPAN

Kabupaten Lombok Timur (31/12) -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, bersama dengan Kepala Balai Penyedia Jalan Nasional (BPJN) NTB meresmikan Jembatan Gantung Bukit Bunga di Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Legislator Senayan yang akrab disapa SJP ini menyampaikan program Jembatan Gantung ini adalah bagian dari kerja kolektif semua elemen.

"Jembatan Gantung ini adalah buah dari kerja kolektif kita bersama. Dari usulan Kepala Desa ke DPR RI, Pemerintah dan semua elemen masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, SJP juga berharap agar jembatan ini bisa dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan berupa kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai umat yg

beragama cara bersyukur nikmat pemberian ini adalah dengan merawat, menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap jembatan ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat," pesannya.

Sementara itu Kepala Desa Jeruk Manis, Nur Hadi Muiz juga menuturkan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak SJP.

"Kami selaku kepala desa dan masyarakat Jeruk Manis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak SJP. Atas kepedulian beliau membawa program

berupa jembatan gantung ini untuk kami masyarakat Desa Jeruk Manis," ungkapnya.

Dengan diresmikan jembatan gantung ini, Kepala Desa Jeruk Manis berharap bisa mempermudah aktivitas masyarakat antar dua desa yang sebelumnya terpisah dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi warga.

"Kami berharap dengan beroperasinya Jembatan Gantung ini bisa mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, pendidikan, wisata dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi warga." Tegasnya.

Acara peresmian ini dihadiri juga oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Camat Sikur, masyarakat Desa dan dimirahkan oleh penampilan musik tradisional Desa Jeruk Manis.

Kegiatan peresmian ini diakhiri dengan penggungtingan pita oleh Suryadi Jaya Purnama.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat II

"Sebagai umat yg beragama cara bersyukur nikmat pemberian ini adalah dengan merawat, menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap jembatan ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat"



Dapatkan 1000 KTA, Ma'unah Didatangi Ahmad Syaikhu

KUTIPAN

Kabupaten Karawang (31/12) -- Namanya Ma'unah. Rumahnya di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Jauh dari pusat kota

Sinyal internet pun susah. Tapi wanita ini berhasil mendapatkan 1000 Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS.

Kabar ini diinformasikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Budiwanto. Mendengar itu, Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mendatangi Ma'unah saat reses.

"Saya sengaja berkunjung ke sini ketika reses di dapil saya. Sebab kagum dengan Ma'unah," kata Syaikhu.

Menurut Presiden PKS itu, mendapatkan 1000 KTA PKS bukan hal mudah. Pasti butuh perjuangan. Tapi Ma'unah sukses meraihnya. "Pasti bukan perkara mudah. Namun ternyata itu dapat dilakukan oleh Ma'unah. Luar biasa," ujar Syaikhu.

Sosok Ma'unah ini harus menjadi karakter kader dan simpatisan PKS dimanapun.

Yakni semangat, bekerja keras dan konsisten.

"Karakter seperti Ma'unah ini harus dimiliki kader dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia dan dunia. Penuh semangat, berjuang gigih, pekerja keras dan konsisten," tegas Syaikhu.

Dalam kesempatan itu, Syaikhu memberikan apresiasi dan KTA PKS kepada Ma'unah.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Ma'unah dan ini KTA PKS langsung saya berikan kepada beliau " tutur Syaikhu.

Ma'unah mengucapkan terimakasih atas kedatangan Syaikhu. Dirinya sama sekali tidak menduga dikunjungi Presiden PKS.

"Terimakasih Ustadz Syaikhu. Saya sama sekali tidak menyangka didatangi Presiden PKS," ungkap Ma'unah.



H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Mendapatkan 1000 KTA PKS bukan hal mudah. Pasti butuh perjuangan. Tapi Ma'unah sukses meraihnya. Pasti bukan perkara mudah. Namun ternyata itu dapat dilakukan oleh Ma'unah. Luar biasa, Karakter seperti Ma'unah ini harus dimiliki kader dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia dan dunia. Penuh semangat, berjuang gigih, pekerja keras dan konsisten"

Bukhori Serahkan 4 Unit Ambulans Dukung Pelayanan Sosial di Dapil

KUTIPAN

Semarang (10/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 1, Bukhori, menyerahkan empat unit ambulans kepada DPD PKS yang tersebar di dapil Jawa Tengah 1, diantaranya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

Bukhori menyebut, bantuan ambulans diberikan demi mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat Jawa Tengah.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan, manfaat dari keberadaan PKS di tengah masyarakat akan terasa apabila segenap anggota PKS berkomitmen untuk memberikan kontribusi maksimal dalam memecahkan permasalahan masyarakat.

Kontribusi tersebut, imbuhnya, dapat diwujudkan melalui inisiatif para anggota PKS yang tersebar di tengah masyarakat untuk mengulurkan bantuan dalam berbagai bentuk.

"Pelayanan kepada masyarakat, tidak melulu bantuan finansial.

Makna kontribusi itu luas, pelayanan kepada masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga sumber daya lain yang diorientasikan untuk memberi pertolongan dan menghadirkan manfaat bagi mereka yang didera kesusahan," ujar Bukhori dalam acara serah-terima ambulans kepada masing-masing Ketua DPD dapil Jawa Tengah 1 di Kantor DPTW PKS Jawa Tengah, Semarang, Minggu (09/01/2022).

Anggota Baleg itu mengatakan, dukungan unit ambulans diharapkan dapat membantu kerja kemanusiaan para anggota PKS di akar rumput dalam situasi normal maupun situasi bencana.

Bukhori menambahkan, selain untuk kepentingan mobilisasi warga pemerlu, unit ambulans tersebut juga dapat berfungsi mengangkut logistik untuk diantarkan ke lokasi pengungsian korban bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Bukhori turut menjelaskan alasan dirinya memasang logo partai dan foto Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri, pada bagian body ambulans. Menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai strategi untuk membuat PKS lebih dikenal masyarakat dengan wajah barunya.

"Pertama, terkait logo partai. Kami menyadari bahwa belum semua orang tahu tentang wajah baru PKS. Karenanya, ikhtiar untuk sosialisasi logo partai menjadi penting supaya partai ini lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Strategi pemasangan di body ambulans merupakan cara efektif untuk menyampaikan nilai humanis PKS kepada publik dengan jangkauan yang dinamis," paparnya.

Kedua, demikian Bukhori melanjutkan, adalah untuk memperkenalkan Ketua Majelis



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah 1

"Pelayanan kepada masyarakat, tidak melulu tentang bantuan finansial. Makna kontribusi itu luas, pelayanan kepada masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga sumber daya lain yang diorientasikan untuk memberi pertolongan dan menghadirkan manfaat bagi mereka yang didera kesusahan"

Syuro PKS, Dr. Salim, dalam rangka mengorbitkannya sebagai tokoh nasional. Publik Jawa Tengah patut mengetahui bahwa PKS memiliki segudang sumberdaya manusia yang unggul, berwawasan kebangsaan dan keagamaan, serta memiliki kiprah di tingkat nasional

maupun global sehingga keberadaan mereka sudah selayaknya diperhitungkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dengan portofolio yang dimiliki, ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Masa Reses, HNW Temui Kader Posyandu dan PKK: Dukung Institusi Keluarga

KUTIPAN

Jakarta (30/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, Hidayat Nur Wahid, melaksanakan kegiatan reses DPR-RI dengan menemui para kader Posyandu dan tim PKK di Kecamatan Pancoran dan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, HNW mengajak mereka untuk meningkatkan kebersamaan dan kepedulian dengan lebih fokus mencegah dan mengatasi permasalahan stunting dan kekerasan seksual yang semakin marak terjadi pada anak-anak.

Menurutnya pembelaan dan pembenahan institusi keluarga adalah pijakan penting untuk solusi yang fundamental dan jangka panjang atas permasalahan tersebut.

"Perlu keberpihakan dan kepedulian lebih dari kita semua untuk mengatasi masalah keluarga dan anak-anak, khususnya masalah stunting dan kekerasan seksual pada anak, agar kita bisa menyela-

matkan institusi keluarga dan masa depan bagi generasi mendatang." ujar Hidayat kepada kader Posyandu dan PKK di kelurahan Cipepadak, Jagakarsa, dan Rawajati, Pancoran, Selasa (28/12/2021).

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting pada anak di Indonesia mencapai 27,7%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di angka 22,2% dan batas yang ditoleransi WHO sebesar 20%.

"Tentu ini sangat menyedihkan, bagaimana mungkin anak-anak bisa tumbuh sehat, baik, cerdas, dan berkualitas, jika mereka sejak balita sudah kekurangan gizi," ujarnya.

Sebagai bentuk

kepedulian yang kongkret, HNW memberikan bantuan untuk pelaksanaan Program Tambahan Makanan (PTM) kepada Posyandu di Pancoran, Jakarta Selatan, dan diterima dengan antusias oleh kader-kader Posyandu.

Masalah kekerasan seksual pada anak juga tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan data KemenPPPA, dari 20.734 kasus kekerasan yang terjadi selama tahun 2021, sekitar 13 ribu atau 62% di antaranya terjadi pada anak usia di bawah 18 tahun. Sebagian besar kasus kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual.

"Tahun 2021 bahkan dianggap sebagai tahun darurat kekerasan seksual pada anak lantaran jumlah dan cakupan kasusnya yang cukup masif.

Jika ini terus terjadi maka akan sangat merusak moral dan mental generasi milenial, merusak dan melemahkan institusi keluarga sebagai pilar penting kehidupan bangsa," lanjutnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Perlu keberpihakan dan kepedulian lebih dari kita semua untuk mengatasi masalah keluarga dan anak-anak, khususnya masalah stunting dan kekerasan seksual pada anak, agar kita bisa menyelamatkan institusi keluarga dan masa depan bagi generasi mendatang,"



Anggota FPKS: BUMN Harus Menjadi Lokomotif Pemberdayaan Masyarakat

KUTIPAN

Kabupaten Jember (03/01) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu tampil terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang merevisi kebijakan penyaluran CSR oleh Menteri BUMN Erick Thohir, kata Amin, harus bisa diimplementasikan ditingkat bawah agar betul-betul berpihak kepada masyarakat.

"Kementerian BUMN mengubah program CSR dengan nama baru yaitu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mengusung paradigma untuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.

Amin menyambut baik kebijakan tersebut dan berharap BUMN bisa lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat.

"Seperti fungsi dan perannya, BUMN bisa berperan aktif sebagai lokomotif pemberdayaan Masyarakat," ujar Amin dihadapan peserta

sosialisasi peran BUMN dalam pemberdayaan masyarakat, Ahad (2/1/2022) di Pondok Pesantren Nurul Muta'allimin, Bangsalsari Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Merujuk Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN, ada dua kebijakan CSR BUMN saat ini, yaitu pertama, untuk kembali merawat alam atau sustainability.

"Kedua, merawat manusia dengan peningkatan kapasitas melalui bantuan pendidikan," sebut Amin.

Menurut Amin, kualitas SDM sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat.

"Karena itu, saya berharap TJSL tidak hanya memberikan bantuan fisik, namun juga non

fisik agar masyarakat khususnya generasi muda memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Amin mendorong BUMN untuk menjadikan lembaga pendidikan pesantren dan masjid sebagai basis pemberdayaan masyarakat.

"Saat ini ada lebih dari 31 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang. Masjid dan Pesantren bisa dijadikan basis pemberdayaan masyarakat, baik dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Karena bagaimanapun kemandirian bangsa harus dimulai dari kemandirian umat," ujarnya.

Wakil rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Lumajang dan Jember) itu pun meminta BUMN terus meningkatkan perannya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baik dalam bentuk kemudahan mengakses permodalan, bimbingan teknis pengelolaan usaha, dan kemitraan usaha antara unit-unit usaha BUMN dengan



AMIN AK.M.M.
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Timur IV

"Kementerian BUMN mengubah program CSR dengan nama baru yaitu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mengusung paradigma untuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat"

UMKM. Holding BUMN Ultra Mikro yang terdiri dari PT BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) harus berpihak pada ekonomi rakyat dengan mendorong usaha mikro naik kelas," ujarnya.

Holding ultra mikro tersebut dibentuk untuk menjangkau pelaku usaha kecil dan mikro, seperti pedagang di pasar, pengrajin

skala rumahang, pedagang bakso, pedagang es keelling, pedagang roti dan sejenisnya.

"Saya yakin, jika usaha ultra mikro berhasil diberdayakan dan naik kelas, maka lebih dari 50% persoalan kemiskinan dan pengangguran bisa terselesaikan," ungkap Amin mengakhiri.

Hadiri Acara TOP Tokoh Perempuan di Dapil,

Anis Byarwati Jelaskan Pentingnya Ketahanan Nasional

KUTIPAN

Jakarta (28/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam acara TOP (Training Orientasi Partai) Tokoh Perempuan Jakarta Timur,

yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Jakarta Timur, yang bertempat di Aula DPD PKS Jakarta Timur.

Pada acara yang diselenggarakan Ahad (26/12/2021) ini, turut hadir Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin yang turut memberi sambutan, Sekretaris DPD PKS Jakarta Timur, Tedy Ramadanus, Ketua BPKK PKS Jakarta Timur Burhanita, beserta segenap pengurus, serta para peserta tokoh Perempuan Penggerak di Masyarakat dan tokoh pengelola Majelis Ta'lim yang ada di Jakarta Timur.

Dalam sesi dengan tema kebangsaan yang

disampaikan, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memaparkan tentang pentingnya ketahanan nasional dan pendekatan Pancagatra yang mencakup lima aspek sosial masyarakat yang bersifat dinamis dalam membentuk ketahanan nasional.

"Pancagatra merupakan konsepsi wawasan nusantara yaitu konsep pada cara pandang serta pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa," ungkap Anis.

Pancagatra, imbuhnya, meliputi aspek sosial masyarakat terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Anggota Komisi XI DPR RI

ini juga menyampaikan bahwa ketahanan nasional adalah pintu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Untuk sampai pada tujuan itu, dibutuhkan kontribusi dari semua kalangan masyarakat.

"Sebagai tokoh perempuan yang memiliki kiprah begitu luas, penting untuk kita memiliki wawasan nasional hingga global dan ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita nasional. Hal itu dilakukan dengan memahami unsur-unsur yang harus kita jaga dalam menciptakan ketahanan nasional, termasuk dari unsur terkecil yaitu membangun ketahanan keluarga", ungkapnya.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa ketahanan nasional Indonesia dibentuk oleh beberapa unsur yang kemudian disebut Astagatra. Astagatra meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra).

"Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan, pancagatra merupakan aspek



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Untuk ikut mewujudkan ketahanan nasional, kita harus mewujudkan ketahanan dimulai dari ketahanan pribadi, keluarga, hingga tingkat masyarakat. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berkontribusi untuk membangun ketahanan nasional Indonesia"

sosial masyarakat terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam)," ujarnya.

Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat

hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara trigatra dan pancagatra. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Terima MUI Pandeglang, Dimiyati Akan **Perjuangkan** Aspirasi Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (04/01) --- Anggota DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah beraudiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa aspirasi disampaikan mulai dari sarana dan prasarana pesantren, rencana wisata religi hingga bantuan hibah dari pemerintah.

“Masukan-masukan yang diterima akan kita perjuangkan nanti melalui Komisi VIII termasuk sarana prasarana pondok pesantren dan juga sanitasi dan juga Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) nanti untuk Pondok Pesantren,” ujar Dimiyati saat menerima pengurus MUI Kabupaten Pandeglang di Ruang Rapat BURT, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Rabu (29/12/2021).

Terkait aspirasi tersebut, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ini akan menyampaikan aspirasi yang sebelumnya disampaikan para ulama terkait bantuan hibah untuk pemerintah kabupaten

dan kota agar dapat diteruskan untuk membangun sarana prasarana pondok pesantren.

Selain bantuan hibah dari pemerintah, para ulama juga meminta agar masjid dan mushola mendapatkan sertifikat tanah melalui program Prona. Adapun masukan lainnya dari para ulama terkait wisata syariah dan religi untuk dapat segera ditetapkan di daerah Kabupaten Pandeglang.

“Nanti akan kami tindak lanjut ke menteri BPN dan PUPR Kepala Kantor BPN di Kabupaten dan Kota. Prona itu kan biayanya murah ada yang gratis. Jadi wisata syariat atau religi ini (dapat) diterapkan di daerah Kabupaten Pandeglang. Yang terpenting tidak bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi yg berlaku,” tutur legislator fraksi PKS itu.

Dirinya pun menitipkan

pesan agar MUI Kabupaten Pandeglang dapat terus berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan secara massif ke masyarakat, khususnya generasi muda. Termasuk memberikan fatwa - fatwa kepada pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial.

“Serta melaksanakan Amar Makruf Nahi Mungkar,” jelas politisi dapil Banten I itu.

Sebelumnya, Ketua MUI Pandeglang K.H.Tubagus Hamdi Ma’ni menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Ia juga berharap, nantinya pemerintah kabupaten dan kota Pandeglang dapat menyalurkan hibah untuk mendukung penyelenggaraan program kerja MUI Pandeglang.

“Harapan kami dana hibah yang untuk MUI Kabupaten agar tetap digunakan untuk kepentingan program di kabupaten,” ujar Ketua MUI Kabupaten Pandeglang tersebut.



**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten I

“Masukan-masukan yang diterima akan kita perjuangkan nanti melalui Komisi VIII termasuk sarana prasarana pondok pesantren dan juga sanitasi dan juga Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) nanti untuk Pondok Pesantren”



Masuk Masa Reses, Andi Akmal **Resmikan** Bantuan Pengereng Padi di Kabupaten Bone

KUTIPAN

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, bahwa bantuan seperti ini sangat penting di implementasikan pada semua daerah sentra penghasil padi. Pengereng padi atau kerap oleh para petani disebut dryer ini sangat efektif mengurangi waktu dari saat panen hingga masa penggilingan

Kabupaten Bone (30/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, memasuki masa reses persidangan II tahun 2021 - 2022, meresmikan bantuan pengereng padi di desa Tocina, Kecamatan Dua Boccor, Kabupaten Bone.

Pengereng padi yang cukup besar dan luas ini menurut Akmal akan membantu para petani atau kelompok tani untuk mengefisienkan waktu proses pengolahan pasca panen padi sehingga berimplikasi pada kecepatan memperoleh hasil panen.

"Alhamdulillah pengereng padi dalam bentuk bangunan yang cukup luas ini dapat direalisasikan untuk masyarakat Tocina. Saya berharap hasil panennya juga dapat dirasakan pada warga atau masyarakat di sekitar wilayah ini menjangkau minimal satu kecamatan", tutur Akmal dalam Sambutannya.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, bahwa bantuan seperti ini sangat penting di implementasikan pada semua daerah sentra penghasil padi. Pengereng padi atau kerap oleh

para petani disebut dryer ini sangat efektif mengurangi waktu dari saat panen hingga masa penggilingan. Proses mengeringkan padi ini jika menggunakan cara tradisional juga sangat boros tempat sehingga bila tidak memadai akan terjadi proses antri yang semakin menambah durasi waktu yang memperlambat perolehan hasil panen petani.

"Ujung setiap proses pengolahan pasca panen ini adalah memenuhi target kemandirian pangan. Minimal memenuhi kebutuhan desa atau kecamatan sendiri, apalagi bila hasilnya besar akan berkontribusi hingga tingkat kabupaten kota. Untuk itu, kami akan terus mendorong pemerintah pusat agar bersinergi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk menurunkan bantuan-bantuan yang pro kerakyatan", Tutup Andi Akmal Pasluddin.



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Alhamdulillah pengereng padi dalam bentuk bangunan yang cukup luas ini dapat direalisasikan untuk masyarakat Tocina. Saya berharap hasil panennya juga dapat dirasakan pada warga atau masyarakat di sekitar wilayah ini menjangkau minimal satu kecamatan",



Kunjungi UMKM di Bekasi, Mahfudz: Pemerintah Harus Berpihak pada Pengembangan UMKM

KUTIPAN

Bekasi (04/01) --- Masa reses Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman diisi dengan berbagai kegiatan. Kali ini mengawali tahun 2022 Mahfudz Abdurrahman berkunjung ke lokasi sentra UKM di Kota Bekasi. Ahad, (02/01/2022).

Kedatangan Mahfudz Abdurrahman disambut para pengurus dan pengerak UKM yang hadir lebih awal di sentra UKM yang berlokasi di Teluk Pucung Bekasi Utara Kota Bekasi.

Mahfudz Abdurrahman yang merupakan Wakil Rakyat dari Kota Bekasi dan Depok menyampaikan rasa syukur karena kondisi pandemi relatif terkendali dan berharap sudah tidak ada lagi penyebaran virus corona di negeri Indonesia, sehingga geliat pertumbuhan UKM terus semakin meningkat. Namun demikian tetap harus menjaga prokes secara baik.

"Alhamdulillah saat ini kondisi pandemic trendnya menurun dan situasi bisa lebih terkendali, semoga para pelaku

UMKM bisa bangkit dan bisa berkembang kembali," ujar Mahfudz usai berdialog langsung dengan beberapa pelaku UKM yang tergabung dalam Koperasi Bina Warga Sejahtera Teluk Pucung di Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan pengurus Koperasi Bina Warga Sejahtera Teluk Pucung Bekasi Utara, dan tokoh tokoh di lingkungan Kp. Teluk Pucung.

Salah satu perwakilan pengurus Koperasi Bina Warga Sejahtera, Andi mengatakan bahwa saat ini sudah ada 245 pelaku UMKM yang bergabung. Targetnya bisa mencapai 1000 UKM.

Diantara mereka adalah

UKM yang pernah mengikuti beberapa program pelatihan Wirausaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Bina Warga Sejahtera maupun oleh Pemerintah seperti yang pernah dilaksanakan oleh Pak Mahfudz Abdurrahman Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

"Perlu kami laporkan bahwa UKM yang sudah tergabung di Koperasi Bina Warga Sejahtera ini mencapai 245 UKM. Beberapa diantara mereka pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pak Mahfudz Abdurrahman. Kedepan kami berharap, UKM yang bergabung terus bertambah sehingga komunitasnya bisa semakin besar. Target saya bisa 1000 UKM. Dan rencana kami mau membuat sentra UKM yang lebih besar lagi sebagai wadah untuk promosi produk dari UKM yang ada," ungkap Andi.

Andi selalu perwakilan menambahkan perlu munculnya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk mau berwirausaha dengan mengembangkan UKM. Ia juga



H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Alhamdulillah saat ini kondisi pandemic trendnya menurun dan situasi bisa lebih terkendali, semoga para pelaku UMKM bisa bangkit dan bisa berkembang kembali,"

menyampaikan terima kasih kepada Mahfudz Abdurrahman yang telah bersedia mengunjungi dan memberikan bantuan untuk pengembangan UKM di bawah binaan Koperasi Bina Warga Sejahtera.

Andi juga berterima kasih pada pemerintah yang telah

membuat program-program untuk mendukung UMKM. Ia berharap komunitasnya bisa diberi informasi dan dibimbing agar lebih banyak UMKM yang dapat mengakses berbagai program tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Tetapkan Status Tanggap Bencana Banjir di Padang Lawas, Aleg PKS: Segera Evakuasi dan Distribusi Bantuan

KUTIPAN

Kabupaten Padang Lawas (05/01) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS disela waktu masa Reses, Iskan Qolba Lubis prihatin dengan musibah bencana banjir bandang yang menimpa Padang Lawas, Sumatera Utara.

Iskan juga merespon sikap Pemerintah yang menetapkan status tanggap darurat bencana, menurut Iskan, Pemerintah telah tepat menanggapi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

"Saya sangat mengapresiasi sikap pemerintah dalam penanganan bencana khusus nya di daerah pemilihan saya yang sampai saat ini, pemerintah setempat dibantu TNI dan Polri masih berupaya melakukan pembersihan sisa-sisa material lumpur, batu serta kayu yang menerjang

pemukiman. Status tanggap darurat ini terhitung mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2022. Pasca kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas masih melakukan penanganan darurat dan pendataan di lapangan", ujar Iskan.

Aleg asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa data yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas masih melakukan penanganan darurat dan pendataan di lapangan, "Data yang saya terima

saat ini dari BPBD sebanyak 15 desa di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas terdampak banjir bandang yang membawa material kayu ini. BPBD setempat melaporkan, banjir bandang ini mengakibatkan 421 rumah warga rusak. Sebanyak 123 di antaranya rusak berat," sebut Iskan.

Bencana air bah ini, imbuhnya, juga merusak bangunan sekolah pondok pesantren, bangunan SD, dan bangunan masjid.

Menurut catatan Kemensos, bencana ini membuat sekitar 300 jiwa terpaksa mengungsi. Petugas BPBD yang dibantu TNI, Polri, warga dan aparat desa melakukan pencarian dan penyelamatan warga.

"Saya berharap disini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas segera mungkin dapat mengevakuasi warga yang terdampak bencana tersebut. Yang paling utama itu keselamatan warga nya jadi kita harus bisa gerak cepat juga



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Ketika bencana terjadi saya langsung kontak Menteri Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menangani tanggap darurat dan siap-siap merehab kembali rumah yang rusak dan sarana infrastruktur lain seperti jalan, sekolah dan masjid. Saya mewakili atas nama rakyat Padang Lawas Khususnya kepada Kementerian Sosial dan BNPB"

dalam membantu dan menyelamatkan masyarakat disana," tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan menuturkan bahwa Pemerintah harus segera mendistribusikan

bantuan-bantuan sosial untuk para korban bencana banjir bandang di Padang Lawas tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dorong Kebijakan Penangkapan Terukur, Aleg PKS Dorong Potensi Industri Perikanan Tumbuh

KUTIPAN

Ambon (01/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mendorong program kebijakan KKP tentang Kebijakan Penangkapan Terukur.

Namun, menurut Saadiah, program tersebut harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

"Dengan begitu, saya berharap, industri perikanan dapat tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi perikanan yang besar dari Aceh hingga Papua," terang Saadiah.

Dorongan mantan Ketua Komisi DPRD provinsi Maluku tersebut, disampaikan saat menghadiri Coffee Morning bertema 'Penangkapan Ikan Terukur untuk Mendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Isu Terkini Kondisi Maritim di Provinsi Maluku', bertempat di Stasiun PSDKP Ambon, Kamis (30/12/2021) kemarin.

"Kami dari komisi tetap mendukung program ini, namun pemerintah harus memberikan jaminan bila kuota yang diatur nantinya harus sesuai potensi di masing-masing zona

penangkapan ikan. Juga jaminan berusaha bagi pelaku usaha dan kepastian pemanfaatan sumber daya ikan yang terukur," harap Uluputty.

Selain memberikan peringatan ke KKP, Uluputty juga menyarankan agar Menteri Trenggono tidak gegabah dalam membuat kebijakan.

"Sebab, sistem kuota komersil, bisa saja menjadi pintu masuk bagi para investor asing dalam aktivitas perikanan di Indonesia, dengan target perikanan Tuna, Tongkol dan Cakalang yang selama ini menjadi komoditas ekspor terbesar di Indonesia," pungkasnya.

Kemudian, lanjut Uluputty, belum adanya jaminan bila para investor menggunakan jasa tenaga kerja Indonesia. Sebab, sejak UU Cipta Kerja disahkan, sudah menghapus kewajiban kapal ikan asing untuk menggunakan minimal 70 persen ABK asal Indonesia.

"Kebijakan sistem kota ini, Memiliki struktur berpikir yang sedikit meloncat. Sebab, jika kebijakan perikanan akan didorong ke arah sistem zonasi dengan kuota penangkapan, seharusnya KKP mengembangkan nelayan lokal berupa sarana dan prasarana serta Pengembangan BUMN Perikanan. Hal ini agar perikanan Indonesia mampu bersaing dengan investor asing yang menurut sumber air berasal dari Tiongkok, Taiwan, Jepang dan Eropa," lanjutnya.

Dewan Dapil Provinsi Maluku ini, juga mengingatkan KKP berhati-hati perihal kebijakan penerapan penangkapan sistem kuota perikanan. Peringatan Uluputty ini, didasarkan atas adanya penolakan dari masyarakat atas terbitnya Permen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan di Lingkup KKP dan Perikanan yang Memuat Pungutan Perikanan dimulai dari Pra Produksi, Pasca Produksi dan Sistem Kontrak.

"Meskipun begitu, sejak dipimipin Pak Trenggono, KKP terus melakukan gebrakan. Salah satunya ya ini, program tentang Kebijakan Perikanan



SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Kebijakan sistem kota ini, Memiliki struktur berpikir yang sedikit meloncat. Sebab, jika kebijakan perikanan akan didorong ke arah sistem zonasi dengan kuota penangkapan, seharusnya KKP mengembangkan nelayan lokal berupa sarana dan prasarana serta Pengembangan BUMN Perikanan"

Terukur," terang Uluputty.

Sebagai informasi, kata Saadiah, terdapat enam zona penangkapan ikan terukur. Empat di antaranya yang menerapkan

sistem kontrak terdiri dari tujuh WPPNRI yaitu 711, 715, 716, 717, 718, 572, dan 573.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Terima Aspirasi dari Gekanas, Politisi PKS: Revisi UU Cipta Kerja **Harus Sejalan** dengan Kepentingan Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (11/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menerima aspirasi dari Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) terkait UU Cipta Kerja melalui meeting virtual Zoom pada Selasa siang (11/01).

Dalam keterangannya, Ledia menyatakan bahwa sedari awal PKS sudah menolak UU Cipta Kerja karena bermasalah, bukan hanya dari sisi materil, melainkan juga sisi formil. Hal ini dikuatkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa status RUU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun.

"Terlepas dari segala kritik yang ada, putusan MK mengingatkan kita bahwa ini adalah pertama kalinya MK mengabulkan gugatan uji formil, bukan uji materil. Jika uji formil

diterima, sudah tidak perlu lagi ada gugatan untuk materil karena semuanya menjadi tidak berlaku", ujar Ledia.

Lebih lanjut, Anggota Komisi X dari F-PKS ini pun menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut atas amar putusan MK tersebut, Baleg DPR telah memasukkan revisi UU Cipta Kerja sebagai daftar kumulatif terbuka.

"Ini (revisi Cipta Kerja) sudah masuk daftar kumulatif terbuka", ungkap Ledia.

Ledia menambahkan, Fraksi and PKS berkomitmen mengawal revisi UU Cipta Kerja apabila nantinya kembali dibahas di DPR.

"Fraksi PKS InsyaAllah tetap konsisten untuk terus mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan pada UU Cipta Kerja sehingga dihasilkan pengaturan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Terlebih dalam bab ketenagakerjaan", ujar Aleg dari Dapil Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Ledia meminta Gekanas untuk melakukan kajian-kajian komprehensif sebagai bahan masukan bagi F-PKS. Selain itu, ia mendorong Gekanas untuk menjalin komunikasi dengan fraksi lain dan melakukan sosialisasi secara simultan kepada masyarakat terkait masalah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.

"Gekanas perlu untuk melakukan safari ke fraksi-fraksi lain guna mendapat dukungan dan perhatian. Mengingat, di bulan Januari ini, fokusnya mungkin akan ke RUU IKN dan RUU TPKS. Takutnya isu ini akan tenggelam. Pencerdasan dan sosialisasi ke publik pun penting dilakukan", pungkas Ledia.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Sedari awal PKS sudah menolak UU Cipta Kerja karena bermasalah, bukan hanya dari sisi materil, melainkan juga sisi formil. Hal ini dikuatkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa status RUU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Terlepas dari segala kritik yang ada, putusan MK mengingatkan kita bahwa ini adalah pertama kalinya MK mengabulkan gugatan uji formil, bukan uji materil. Jika uji formil diterima, sudah tidak perlu lagi ada gugatan untuk materil karena semuanya menjadi tidak berlaku"



Serap Aspirasi terkait Pemilu, Aleg PKS: Kami Mendorong Terbentuknya Demokrasi yang Substansial di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (11/01) -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima aspirasi dari organisasi Satu Jari Indonesia berkaitan dengan usulan atas perubahan UU Pemilihan Umum melalui meeting virtual Zoom, Selasa pagi (11/1).

Dalam pertemuan tersebut, Teddy Setiadi menyampaikan bahwa Fraksi PKS senantiasa mendorong terbentuknya aturan terkait Pemilu yang lebih baik guna menciptakan demokrasi yang substansial, bukan hanya prosedural.

"Selama ini kita masih terjebak dalam Pemilu yang sifatnya prosedural, sehingga aspek-aspek substansial sering terabaikan. Hal inilah yang sebenarnya diharapkan oleh PKS dapat diubah dalam Pemilu 2024 nanti", ujar Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa agenda politik di tahun 2024 sangatlah banyak,

mulai dari pemilu di tingkat nasional hingga pilkada di tingkat satu dan dua. Hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi setiap partai politik untuk mempersiapkan kadernya guna maju di Pemilu dan Pilkada. Terlebih, jadwal pelaksanaan Pemilu belum diputuskan hingga saat ini.

"Pemilu awalnya direncanakan Februari. Namun, ada usulan terbaru dari Pemerintah untuk dilangsungkan pada bulan Mei 2024. Sementara, Pilkada dijadwalkan pada bulan November 2024. Ini masih akan dibahas. Harapan kami, Pemilu bisa dilakukan lebih awal agar

ada waktu persiapan yang lebih bagi partai untuk mempersiapkan diri", lanjut legislator asal Bandung tersebut.

Selain itu, Teddy menyoroti soal kaderisasi politik yang dinilai masih harus diperbaiki melalui serangkaian aturan, baik melalui UU maupun Peraturan KPU.

"Usulan penting yang disampaikan oleh Satu Jari Indonesia tadi ialah perihal kaderisasi politik. Secara umum, memang ada fenomena macetnya rekrutmen kepemimpinan bangsa di partai politik. Realitasnya seperti itu. Hal inilah yang sama-sama perlu kita perbaiki", jelas Teddy.

Terakhir, Teddy mengharapkan agar Pemilu dan Pilkada yang diselenggarakan di tahun 2024 akan menghasilkan pemimpin terbaik dan lepas dari polarisasi politik yang berbahaya bagi keutuhan bangsa.

"Kami mengharapkan bahwa pola-pola yang terjadi saat ini, seperti keterbelahan politik, tidak berulang. Salah



TEDDY SETIADI, S.Sos.
Anggota Komisi II DPR RI

"Usulan penting yang disampaikan oleh Satu Jari Indonesia tadi ialah perihal kaderisasi politik. Secara umum, memang ada fenomena macetnya rekrutmen kepemimpinan bangsa di partai politik. Realitasnya seperti itu. Hal inilah yang sama-sama perlu kita perbaiki",

satu langkah yang kami dorong ialah melalui kebijakan Presidential Threshold 0%. Agar pasca pesta demokrasi, konsentrasi

bangsa benar-benar ditujukan untuk membangun negara sepenuhnya." tutup Anggota Komisi II ini.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Saadiah Uluputty Raih Penghargaan Politisi inspiratif Peduli Kemanusiaan

KUTIPAN

Ambon (30/12) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty sangat fokus terhadap masalah kemanusiaan sehingga mendapat perhatian dan apresiasi dari Hiapolo Pilantropi Indonesia.

Saadiah menerima penghargaan dari Hiapolo Pilantropi Indonesia untuk kategori Politisi inspiratif Peduli Kemanusiaan, Senin (27/12/2021).

Saadiah menerima penghargaan bersama 22 perempuan inspiratif dari seluruh Indonesia yang digelar di Aula Perpustakaan Nasional.

“Rasa Syukur dan haru, pengabdian, kerja dan perhatian kepada masyarakat Maluku mendapat apresiasi dari Hiapolo Pilantropi Indonesia”, tandas Anggota Komisi IV ini.

Anugerah dan penghargaan yang diterima oleh dirinya, diberikan oleh Hiapolo Filantropi Indonesia, bersamaan dengan rangkaian refleksi Kongres Perempuan Indonesia.

Dengan mengusung tema ‘Peran Strategis Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa Menuju Indonesia Maju’, Hiapolo menggelar acara Perempuan Bicara dan Penghargaan kepada 22 Perempuan Inspiratif Ibu Bumi.

Saadiah menandakan, dirinya sudah menolak dan merasa tak layak. Teman teman aktivis lanjut Saadiah, mungkin punya penilaian sendiri.

“Mereka menyampaikan, jika mengikuti kiprah dirinya setelah pelantikan sebagai anggota DPR, bersamaan terjadi bencana gempa 6,8 SR di Maluku,” ungkapnya.

“Dari kritik Menteri terkait ungkapan pengungsi membebani pemerintah, hingga

turun langsung ke lokasi bencana bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI, datang ke kamp pengungsian membagi sembak, air, bekerjasama dengan chargo nusantara (IPCN) ,dan membangun tenda pengungsian di Maluku”, terang Saadiah.

Penghargaan ini, kata Saadiah dedikasikan untuk semua pihak yang sudah bekerja dan berkontribusi untuk masyarakat.

“Terkhusus keluarga di rumah, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, Tim kerja dan seluruh masyarakat Maluku”, tegas Saadiah.

Dengan tagline ‘Melayani Dengan Cinta’, Saadiah berharap terus menjadi pelopor yang melayani masyarakat dengan hati yang tulus ikhlas.

“Jargon ini mengingatkan bahwa mandat suara dari rakyat harus dibarengi dengan karya dan perjuangan untuk tak henti bekerja, mengabdikan bagi masyarakat Maluku”, terangnya.

Terpisah, Ichi Amahoru, Direktur Hiapolo Filantropi Indonesia dalam sambutannya pada acara Penghargaan kepada 22 Perempuan Inspiratif Ibu Bumi



SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

“Penghargaan ini dedikasikan untuk semua pihak yang sudah bekerja dan berkontribusi untuk masyarakat. Terkhusus keluarga di rumah, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, Tim kerja dan seluruh masyarakat Maluku”

menerangkan, refleksi hari ibu ini bukanlah sebatas serimonial belaka, namun sebagai spirit perempuan dalam membangun bangsa. Perempuan harus merdeka, melawan diskriminasi serta menentang marginalisasi.

“Hiapolo sebagai Lembaga independen pemerhati Sosial, Politik dan Demokrasi akan terus menjadi garda terdepan dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer dan terus mengapresia-

si prestasi kaum muda khususnya perempuan yang sudah berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia maju,” lanjut perempuan yang biasa disapa Ichi.

Ichi Amahoru menegaskan jika kemajuan Indonesia tergantung kualitas perempuannya.

“Jika perempuan unggul maka Indonesia akan maju, karena perempuan adalah rahim peradaban,” tutupnya.



Apresiasi Judicial Review
Parlementary Threshold ke MK,

HNW Dukung Pemohon Perkuat Argumentasi

KUTIPAN

Jakarta (07/01) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendukung langkah konstitusional sejumlah pihak yang mengajukan Judicial Review terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

Hidayat juga mengapresiasi hakim-hakim MK yang tidak langsung menolak, tetapi mempertimbangkan dengan meminta kepada para pemohon judicial review untuk memperkuat argumentasi.

Menurutnya, hal tersebut adalah perkembangan positif sikap MK yang menandakan Hakim-Hakim MK mulai bersikap kritis objektif untuk memenuhi ketentuan konstitusi dan kedaulatan Rakyat.

"Itulah harapan Warga ketika ajukan judicial review agar MK mengedepankan aspek ketentuan Konstitusi terkait kedaulatan Rakyat dalam memeriksa dan memutus perkara

tersebut. Yang Mulia Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 6/1/2022 sudah mulai menyidangkan sejumlah permohonan Judicial Review agar Presidential Threshold menjadi 0%. Semoga para hakim MK akhirnya dapat membuat putusan yang lebih memenuhi ketentuan Konstitusi yaitu adil dan berpihak kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan. Aturan-aturan konstitusional itu dengan eksplisit disebut dalam; Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (07/01).
HNW sapaan akrabnya

berharap pasal-pasal tersebut sangat penting menjadi pertimbangan para hakim MK menjadi batu uji dalam Judicial Review tersebut.

"Semoga permohonan untuk koreksi PT 20% menjadi 0% itu dapat dikabulkan, agar Pilpres 2024 kelak lebih memenuhi asas konstitusi dengan kedaulatan Rakyatnya, dan menjanjikan kemungkinan hasil yang lebih berkualitas, dan tidak mengulangi pembelajaran sebagaimana dalam Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, karena sangat terbatasnya capres/cawapres akibat pemberlakuan Pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen," jelasnya.

Lebih lanjut, HNW menyadari bahwa permohonan uji materi mengenai PT 20 persen ini sebelumnya sudah 17 kali diajukan dan diputus oleh MK dengan amar putusan ditolak dan tidak dapat diterima.

"Salah satu pertimbangan MK adalah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang atau open legal policy, dan bukan terkait dengan konstitusionalitas norma. Namun, yang perlu diingat, putusan tersebut pernah tidak diperoleh secara bulat, setidaknya ada 3 hakim konstitusi ketika itu yang setuju agar PT dihapus," papar HNW.

Wakil Ketua Majelis Syuro



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Agar tidak ada pihak yang berkilah bahwa karena keterbatasan waktu, pelaksanaan keputusan MK yang mengubah PT 20% menjadi 0% persen tidak bisa dilakukan. Ini juga harus diantisipasi oleh MK dan oleh DPR. Demi Pilpres yang lebih adil, berkualitas, dan terpenuhinya asas Keadilan dan Kedaulatan Rakyat"

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap dengan jawaban Hakim MK diatas, maka ada harapan Hakim-Hakim MK sekarang ini benar-benar melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dan mempertimbangkan kedaulatan Rakyat yang mengajukan judicial review, sehingga hal ini mengisyaratkan kemungkinan adanya harapan

bahwa putusan MK kali ini akan berbeda, karena para pemohon memiliki argumentasi yang lebih kuat, masalah akibat diberlakukannya PT 20% juga makin terpetakan, dan komposisi serta spirit hakim Konstitusi yang juga telah berubah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



*Turut
Berduka
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

H. Rahman Amin

Anggota DPR RI Periode 2009-2014
Mantan Ketua Wilda Kalimantan/

Wafat pada Senin, 17 Januari 2022
Jam 19.12 WIB di RSPAD Jakarta

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta
menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya
Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Presiden PKS Yakin KH. Miftachul Akhyar dan KH. Yahya Cholil Staquf akan **Sukses** Pimpin NU

KUTIPAN

Menurut Syaikh yang pernah menjadi santri di Pesantren Buntet Cirebon, sosok kedua kyai merupakan orang yang tepat menjelang satu abad usia NU. Keilmuan agama, kharisma dan karakter kepemimpinan keduanya sudah tak perlu diragukan lagi.

Jakarta (28/12) — Terpilihnya KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH. Yahya Cholil Staquf menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 akan membawa kesuksesan.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikh menanggapi hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung.

"Selamat dan sukses buat NU. Saya yakin keduanya akan sukses selama menakhodai NU lima tahun ke depan," ujar Syaikh.

Menurut Syaikh yang pernah menjadi santri di Pesantren Buntet Cirebon, sosok kedua kyai merupakan orang yang tepat menjelang

satu abad usia NU. Keilmuan agama, kharisma dan karakter kepemimpinan keduanya sudah tak perlu diragukan lagi.

"Keduanya sosok Kyai yang tepat. Memiliki kharisma, karakter kepemimpinan dan ilmu agama yang mumpuni," jelas Syaikh.

Syaikh menambahkan, NU akan semakin kuat, mandiri dan berkontribusi untuk perdamaian dunia sesuai tema Muktamar ke-34.

"Saya optimistis. NU ke depan semakin kuat, mandiri dan kontribusinya bagi perdamaian dunia akan semakin besar," tambah Syaikh.

Pergantian kepemimpinan

menunjukkan berjalannya proses kaderisasi di tubuh NU.

"Berlangsung lancarnya proses pergantian kepemimpinan di NU menjadi bukti terjadinya proses kaderisasi dan semakin memperkuat Fikrah Nahdliyah yang moderat dan reformatif" ujar Syaikh.

PKS akan selalu siap bersinergi, kebersamaan serta mendengarkan nasihat dari NU untuk selalu mengokohkan akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan bersama-sama menampilkan nilai-nilai Islam moderat yang rahmatan lil 'alamin dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Insy Allah kami akan selalu siap bersama NU. Juga mendengarkan nasihat pemimpin dan Para Kyainya," pungkas Syaikh.



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"PKS akan selalu siap bersinergi, kebersamaan serta mendengarkan nasihat dari NU untuk selalu mengokohkan akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan bersama-sama menampilkan nilai-nilai Islam moderat yang rahmatan lil 'alamin dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Catatan Akhir Tahun, Presiden PKS: **Siapa yang Diuntungkan Pindah Ibu Kota Negara Saat Pandemi?**

KUTIPAN

Jakarta (31/12) — Presiden PKS Ahmad Syaikhulmuhammad bertanya kengototan Pemerintah untuk tetap menggebut proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi.

Saat ini potensi hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi, tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran semakin banyak, jutaan UMKM tutup dan gulung tikar, serta peningkatan utang negara yang semakin tidak terkendali, tiba-tiba Pemerintah tampak tergesa-gesa memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).

Ia mengurai, RUU IKN ini tiba-tiba masuk merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undangan MD3 dan Tata Tertib DPR RI dalam proses pembahasan. RUU IKN Seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama.

"Presiden dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain seperti pemulihan ekonomi nasional, pandemi dan penyehatan fiskal," ujar Syaikhulmuhammad dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021, Kamis (30/12/2021) malam.

PKS memandang bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas.

"Apa urgensinya Ibu Kota Negara harus dipindah dalam waktu singkat? Publik jadi bertanya-tanya: untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek

Ibu Kota Baru ini?" tanya Syaikhulmuhammad.

"Argumen Pemerintah yang mengatakan bahwa Ibu Kota harus dipindah karena Jakarta sering banjir dan berpotensi akan tenggelam. Maka pertanyaan itu bisa kita balik pertanyakan kepada Pemerintah: Apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam sehingga Ibu Kota harus dipindah ke Kalimantan Timur?" tanya dia lagi.

Di sisi lain, ungkap Syaikhulmuhammad, akhir-akhir ini banjir justru melanda kawasan calon ibu kota negara baru yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?" kata Syaikhulmuhammad kembali bertanya.

Syaikhulmuhammad mengingatkan, sebagai pemimpin yang baik, maka Pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah banjir Jakarta dengan tuntas.

"Tidak bisa Pemerintah lari

**H. AHMAD SYAIKHU**

Presiden PKS

"Argumen Pemerintah yang mengatakan bahwa Ibu Kota harus dipindah karena Jakarta sering banjir dan berpotensi akan tenggelam. Maka pertanyaan itu bisa kita balik pertanyakan kepada Pemerintah: Apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam sehingga Ibu Kota harus dipindah ke Kalimantan Timur?"

dari tanggung jawabnya menuntaskan masalah di Ibu Kota DKI Jakarta dengan sekadar memindahkan Ibu Kota sebagai solusi pragmatisnya," Syaikhulmuhammad mengingatkan.

Pemerintah harus belajar dari proses legislasi Omnibus Law

Cipta Kerja. Ketika kepentingan oligarki di atas kepentingan rakyat, maka disaat itulah pemerintahan akan kehilangan rasionalitas dan hati nuraninya. Kebijakan disusun atas dasar nilai kepentingan bukan atas dasar nilai kebenaran.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***